



Dr. Anang Sutono, CHE

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

(Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis Penta Helix Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Ketahanan Nasional)

Dr. Anang Sutono, CHE

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

UPI PRESS



Dr. Anang Sutono, CHE saat ini berstatus sebagai dosen Manajemen Bisnis Pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung dan sebelumnya bertugas menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kawasan Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua STP NHI Bandung sejak 2014 dengan motto "*Proud Of Past and Confident for Tomorrow*". Penulis memulai karir sebagai dosen di STP NHI Bandung sejak Tahun 1992.

Selain itu, penulis merupakan Alumni PPSA XXI-2017 LEMHANNAS (Lembaga Ketahanan Nasional) RI. Penulis mendapat mandate oleh Menteri Pariwisata sebagai Pengarah Program Visit Wonderful Indonesia (ViWI) 2018 dan kembali diberi kepercayaan pada Tahun 2019 menjadi Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal.

Dr. Anang Sutono, CHE meraih gelar Doktor dari Universitas Pendidikan Indonesia (2016) dan gelar Magister Manajemen Pariwisata dari Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung (2005), dan mendapat gelar Master Specialization dalam bidang Manajemen Hotel di Scuola Internazionale de Scienze Turistiche (SIST:2001) Roma, Italia. Beasiswa tersebut diberikan oleh UN-WTO dan Kementerian Luar Negeri Italia. Penulis juga merupakan lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta (1990). Selsin itu penulis juga mendapat gelar Certified Hospitality Educator (CHE) dari American Hotel and Lodging Educational Institute (AHLEI) Florida, USA pada Tahun 2012. Saat ini penulis merupakan anggota aktif dewan Asean Tourism Research Association (ATRA) sekaligus menjabat sebagai Vice President Asia Pacific Institute of Event Management (APIEM).

Dr. Anang juga pernah menjadi pembicara di beberapa forum internasional di antaranya di UK, Malaysia, India, China, Papua New Guinea, Thailand, Spanyol, dan Prancis.



UPI PRESS

UPT Penerbitan dan Percetakan
Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudi No. 229 Bandung 40154 Indonesia
Website: <http://upipress.upi.edu> | E-mail: upipress@upi.edu



PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

(Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata
Berbasis *Penta Helix* Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa
dalam Rangka Ketahanan Nasional)

Dr. Anang Sutono, CHE.

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 113
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

- (1) Setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah)

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

(Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata
Berbasis Penta Helix Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa
dalam Rangka Ketahanan Nasional)

Dr. Anang Sutono, CHE.



UPI PRESS

UPT Penerbitan dan Percetakan - Universitas Pendidikan Indonesia
Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154 Indonesia
Website: <http://upipress.upi.edu> | E-mail: upipress@upi.edu

PARIWISATA DAN KETAHANAN NASIONAL

(Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix* Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional)

Copyright © 2020, Anang Sutono - Universitas Pendidikan Indonesia Press

Penulis : Anang Sutono
Penyunting : Muhammad Hanafi
Haryadi Darmawan
Penata letak : Yadi Mulyadi
Desain sampul : Yustinus Hendro Wuarmanu
Dian Junaedi

Diterbitkan oleh:

UPI Press

UPT Penerbitan dan Percetakan - Universitas Pendidikan IndonesiaJl. Dr.

Setiabudhi No.229 Bandung 40154 Jawa Barat

Telp. (022) 2013 163 Ext. 4502 | Hp. +62 87823617694

Website: <http://upipress.upi.edu> | E-mail: upipress@upi.edu

Cetakan Pertama, Februari 2020x+

124 hlm; 15,5 cm x 23 cm

ISBN 978-623-7776-08-6



Penerbit UPI Press Anggota IKAPI dan APPTI

(Ikatan Penerbit Indonesia dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku initermasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.
(Isi di luar tanggung jawab penerbit)

PRAKATA

ASSALAMUALAIKUM WrWb. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, pada akhirnya buku *Pariwisata dan Ketahanan Nasional: Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis Penta Helix Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional* ini dapat terbit setelah melalui proses cukup panjang dan melelahkan bagi penulis.

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komperhensif dan solusi efektif dalam memahami pokok persoalan pembangunan pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *Penta Helix*. Sekaligus juga setiap pembaca diharapkan dapat menemukan faktor-faktor lingkungan stretegis yang berpengaruh dan kondisi pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *Penta Helix* saat ini.

Buku yang berada di tangan Anda ini turut menjabarkan kualitas edukasi di Indonesia di mana pendidikan yang berorientasi pada kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Tentu tak lepas dari itu, ada harapan agar mewujudkan sebuah bangsa yang berdaya saing, dengan kualitas masyarakat yang berkepribadian dan memiliki kebudayaan yang unggul.

Dalam konteks pembangunan bangsa, bisa dikatakan bahwa pembangunan pariwisata harus bersinergi maka diperlukan sebuah pendekatan yang disebut *Penta Helix*, bahwa pariwisata Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen, khususnya akademisi, pebisnis, komunitas/masyarakat, pemerintah, dan media.

Penta Helix menjadi kekuatan ekonomi nasional. Melalui sektor pariwisata yang didukung oleh kemampuan profesionalisme sumber daya alam bidang kepariwisataan akan berdampak pada penciptaan ketahanan nasional. Kondisi ini akan memberi dampak positif bagi terciptanya bangsa yang makmur dan sejahtera.

Tentu ada keterbatasan dalam karya ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati, penulis memohon saran konstruktif untuk penyempurnaan naskah ini.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh *stakeholders* yang membutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata berbasis *Penta Helix* guna peningkatan daya saing bangsa dalam rangka ketahanannasional.

Inshaallah, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat dan pengabdian tiada henti kepada negara yang amat kita cintai dan banggakan, Indonesia. Ini semua demi tercapainya cita-cita luhur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar NKRI.

Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amien. *Wassalamualaikum Wr Wb.*

Bandung, Januari 2020

Dr. Anang Sutono, CHE

Blank page

Persembahan...,

Buku ini saya persembahkan pada
Keluarga besar Surodimedjo,
Keluarga besar R.H Hidayat dan
“Red Rosers”
yang selalu memberi semangat dengan tulus.,
InshaAllah Barokah, Amien.

Blank page

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
Bab I Pokok Persoalan <i>Penta Helix</i>	1
Bab II Paradigma Ketahanan Nasional dan Pendidikan Vokasi.	17
Bab III Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.....	36
Bab IV Tinjauan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis <i>Penta Helix</i> saat ini.	51
Bab V Kondisi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata yang Diharapkan.....	68
Bab VI Konsep Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata yang Diharapkan.....	87
Bab VII Penutup.	117
Daftar Pustaka.....	121

Blank page

BAB I

POKOK PERSOALAN *PENTA HELIX*

1. Perhatian Pemerintah pada Pengembangan Pendidikan Vokasi

UNDANG-Undang Dasar 1945 pasal 33, isinya terkait dengan hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, seperti yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

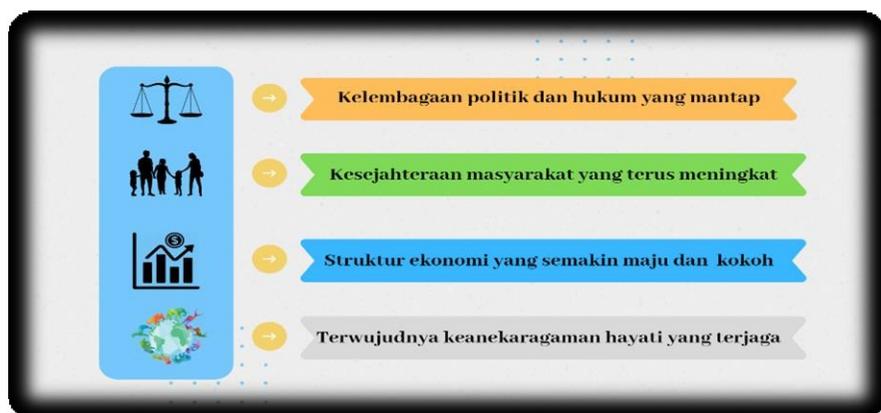
Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menetapkan bahwa tujuan rencana tersebut adalah Indonesia berpenghasilan Menengah-Tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Hal ini menandakan bahwa sasaran RPJMN ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

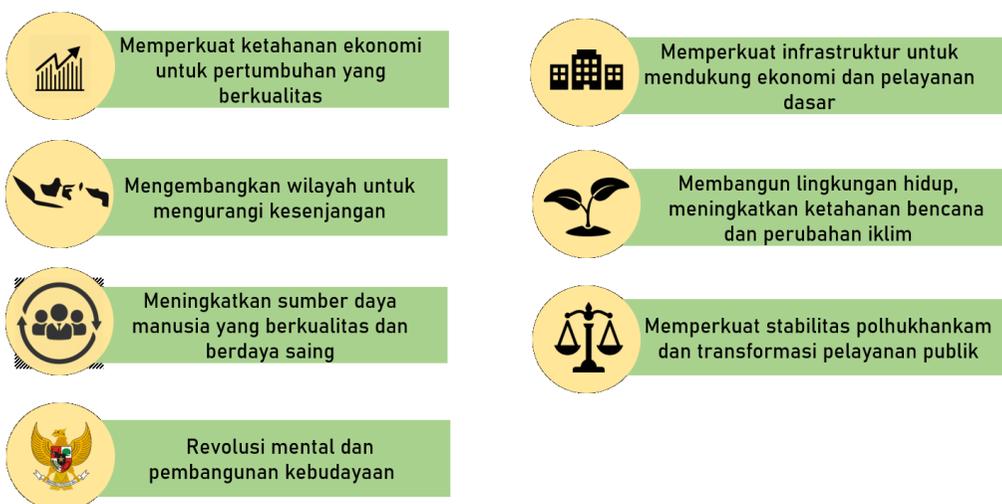
Terdapat empat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Sumber: Narasi RPJMN IV tahun 2020-2024/Bappenas

Sementara itu, berdasarkan tema dan agenda RPJMN IV tahun 2020-2024 ini, pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan dan melanjutkan tujuh agenda pembangunan. Dari tujuh agenda itu, satu di antaranya adalah meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020 – 2024



Tentu keunggulan kompetitif ini harusnya didukung oleh sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Sayangnya, bila membaca data BPS tingkat pengangguran tenaga di Indonesia, mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

<i>dalam juta</i>	2013	2014	2015	2016
Tenaga Kerja	120.2	121.9	122.4	127.8
- Bekerja	112.8	114.6	114.8	120.8
- Menganggur	7.4	7.2	7.6	7.0

Sumber: BPS, 2017

Data Sakernas BPS Februari 2016 mencatat angkatan kerja Indonesia mencapai 127,67 juta jiwa dimana sekitar 60,38 persen adalah lulusan SMP ke bawah yang menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM di Indonesia¹. Sementara itu, komposisi pengangguran yang didasarkan kepada tingkat pendidikan dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2. Komposisi Pengangguran Nasional

Tingkat	2014	2015	2016
Tidak Pernah Sekolah	134,040	124,303	94,293
Tidak/Belum Tamat SD	610,574	603,194	557,418
SD	1,374,822	1,320,392	1,218,954
SLTP	1,893,509	1,762,411	1,546,699
SLTA UMUM/ SMU	847,365	1,174,366	1,384,327
Akademi/Diploma	195,258	254,312	249,363
Universitas	398,298	565,402	695,304
Total	7,147,069	7,454,767	7,024,172

Sumber :BPS, 2017

Dalam konteks pengembangan SDM, pendidikan merupakan langkah awal dalam mendapatkan SDM yang berkualitas. Sesuai dengan pasal 31 Undang -Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ini adalah tanggung jawab pemerintah ataupun negara dalam kemajuan bangsa ini. Pasal ini menegaskan, negara harus memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan di Indonesia. Bahkan salah satu ayat dalam pasal ini mengatakan, pemerintah harus memberikan anggaran setidaknya 20% dari APBN Negara.

Berdasarkan UU no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam UU ini dijelaskan dalam Bab VI Pasal 13 terkait dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang meliputi:

- a. Jalur pendidikan: 1). Pendidikan formal, 2). Pendidikan informal, 3). Pendidikan non formal.
- b. Jenis pendidikan: 1). Pendidikan umum, 2). Pendidikan kejuruan, 3). Pendidikan akademik, 4). Pendidikan profesi, 5). Pendidikan keagamaan, 6). Pendidikan vokasi.

Sistem Pendidikan Nasional ini juga sejalan dengan rencana besar Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Ma'aruf Amin. Dalam kepemimpinannya, Presiden Jokowi berharap Indonesia perlu melakukan perombakan besar-besaran dalam dunia pendidikan agar mendapatkan SDM yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan bangsa. Presiden menyebutkan ada lima rencana besar yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan. Lima kerangka besar ini sebagaimana dijelaskan dalam kerangka kinerja pemerintahan berikut ini:

Rencana Besar Joko Widodo Tingkatkan Kualitas SDM

Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia perlu melakukan perombakan besar-besaran mengenai **kualitas SDM**

Lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan didukung untuk melakukan pembenahan secara besar-besaran

- 1** SDM yang menguasai ketrampilan dan menguasai ilmu pengetahuan masa kini dan masa depan
- 2** Pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, memperjuangkan kepentingan nasional dan tanggap terhadap perubahan dunia
- 3** Ketrampilan vokasional atau *the emerging skills* harus sudah dilatihkan sejak pendidikan menengah
- 4** SDM harus kompetitif dalam karakter
- 5** SDM harus kompetitif dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan ketrampilan

Sumber: Pidato Kenegaraan | Produksi 16-08-2019

Indonesia baik.id | IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaikID | @IndonesiaBaikid

Sumber: Pidato kenegaraan/Kemenpar

Rencana besar pemerintah terkait meningkatkan SDM yang menguasai keterampilan, pendidikan yang berakar kepada kebudayaan, keterampilan vokasional, SDM yang kompetitif dalam karakter, dan SDM yang mampu menguasai ilmu pengetahuan juga disebutkan secara jelas dalam narasi RPJMN Bab IV bahwa pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup dan inklusif, termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas.

Nelson Mandela dalam sidang UNESCO, 2005 menyatakan bahwa *“Education is the most powerful weapon to improve people quality of life”*. Dari pernyataan ini dapat ditarik asumsi bahwa kualitas hidup manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan.

Menurut *World Education Forum* (WEF), kunci utama dan majunya pembangunan pendidikan di suatu negara adalah karena adanya kepedulian pemerintah yang begitu serius dalam menangani sektor pendidikan. Soemarto dalam Yulia (2015;437) menambahkan, keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa yang bersangkutan.

Indonesia menghadapi berbagai permasalahan menyangkut kualitas pendidikan yang masih rendah, yang mengakibatkan daya saing bangsa, baik di tingkat regional ASEAN, terlebih lagi di tingkat dunia, kalah bersaing dengan negara lain².

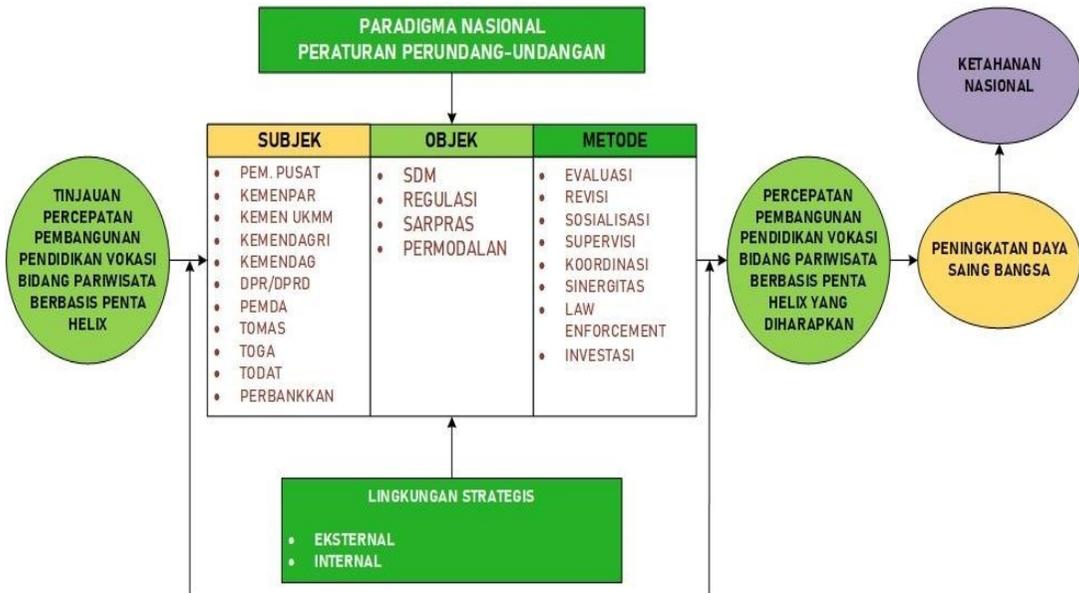
Dalam konteks pembangunan pendidikan vokasi bidang pariwisata saat ini dilakukan oleh tiga kementerian, yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pariwisata mengelola pendidikan vokasi yang terbagi atas tingkat sekolah tinggi, politeknik dan tingkat akademi
- b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemenristekdikti), mengelola pendidikan vokasi bidang pariwisata yang bernaung di bawah perguruan tinggi negeri maupun swasta
- c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membawahi pendidikan vokasi bidang pariwisata pada tingkat pendidikan menengah, yaitu Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata.

Kendati demikian paradigma nasional peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan berbasis *Penta Helix* tak bisa lepas dari berbagai instansi pemerintahan yang ada. Peningkatan daya saing bangsa yang berujung pada percepatan pembangunan butuh kerja sama antar semua lini.

POLA PIKIR

PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PARIWISATA BERBASIS *PENTA HELIX* GUNA PENINGKATAN DAYA SAING BANGSA DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL



Berdasarkan data dari Himpunan Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI) tercatat sebanyak 130 lembaga pendidikan penyelenggara pendidikan vokasi bidang pariwisata dengan 231 program studi (D1 sampai dengan S2). Sementara berdasarkan data Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, terdapat 100 SMK pariwisata dari 13.592 SMK di Indonesia.

2. Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata: Pilar Peningkatan Daya Saing Bangsa

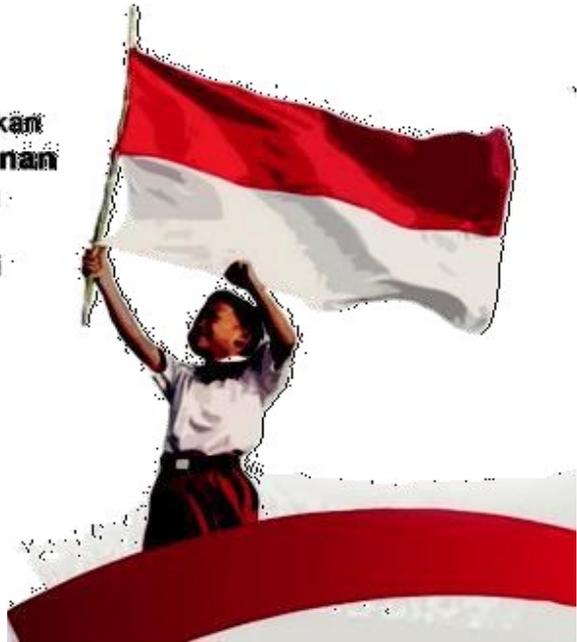
Pemerintah sendiri lewat Presiden Jokowi menaruh perhatian serius pada pengembangan pendidikan vokasi, seperti yang disampaikan dalam Peresmian PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, pada 2017 yang menyatakan bahwa “Pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang memiliki kecocokan ‘link kerja’ antara vokasi dan industri”.

Revitalisasi pendidikan vokasi disahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 yang diikuti oleh jalinan kerja sama pendidikan vokasi lintas kementerian, diantaranya oleh Kemendikbud, Kemenristekdikti, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Mengacu kepada perhatian pemerintah tersebut di atas, maka dibutuhkan pula sinkronisasi dalam pengelolaan pendidikan vokasi bidang pariwisata antara pemerintah, institusi pendidikan, dan swasta. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing kompetensi lulusan vokasi bidang pariwisata sesuai dengan tingkatan pendidikan. Tentu semua ini untuk pembangunan SDM yang berkualitas sebagai kunci kesuksesan bangsa Indonesia

Dimensi persaingan ekonomi tersebut tidak saja meliputi produk, tetapi juga pada tingkat kualitas/produktivitas tenaga kerja. Persaingan kualitas/produktivitas tenaga kerja secara konkret telah mulai lebih dulu yakni sejak diberlakukannya AFLA (*ASEAN Free Labor Area*) pada 2003 yang memberi kebebasan mobilitas dan persaingan tenaga kerja di negara-negara ASEAN.



**"Kita akan memberikan
prioritas pembangunan
kita pada pembangunan
sumber daya manusia.
Pembangunan SDM menjadi
kunci Indonesia ke depan."**



Daya saing adalah kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan suatu produk barang dan jasa yang memenuhi kriteria tertentu (*internasional standard*), dan kemampuan mewujudkan tingkat pendapatan yang tinggi secara berkelanjutan, serta meraih peluang kerja.³

Dijelaskan pula bahwa daya saing menggambarkan kemampuan suatu bangsa dalam menghadapi tantangan masa depan, dan kesiapannya untuk berinteraksi dengan bangsa lain yang menunjukkan tingkat keunggulannya dibandingkan dengan bangsa lain.

Asian Development Bank (2003) dalam penelitiannya menunjukkan lima faktor persaingan internasional yang meliputi: teknologi, sumber daya manusia, struktur organisasi, pemerintah dan peran modal dan keuangan.

Berdasarkan data *World Economic Forum* (WEF) 2016, menempatkan indeks daya saing bangsa Indonesia di peringkat 41 dari 138 negara. Indonesia bahkan tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Demi mengatasi ketidakberdayaan ini, perlu suatu program nasional sebagai pilar peningkatan daya saing bangsa. Salah satunya adalah revitalisasi

pendidikan vokasi di Indonesia. Pendidikan vokasi merupakan kebutuhan dasar yang mendesak pada era pembangunan Indonesia saat ini.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program pendidikan Diploma (Diploma 1- Diploma 4) yang setara dengan program pendidikan akademik Strata 1 (S1). Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi, kelanjutannya Magister Terapan sampai dengan Doktor Terapan.

Dalam konteks daya saing SDM, berdasarkan WEF yang melansir laporan *Global Human Capital Report 2017*, Indonesia menempati posisi 65 dari 130 negara yang diukur berdasarkan empat elemen indikator *human capital*, yakni:

- *capacity* (kapasitas kemampuan pekerja berdasarkan melek huruf dan edukasi)
- *deployment* (tingkat partisipasi pekerja dan tingkat pengangguran)
- *development* (tingkat pendidikan dan partisipasi pendidikan)
- *know-how* (tingkat pengetahuan dan kemampuan pekerja serta ketersediaan sumber daya).

Pariwisata yang tercantum dalam NAWACITA Pemerintahan Presiden Jokowi sebagai salah satu sektor ekonomi nasional, mengandalkan pendidikan vokasi dalam penciptaan tenaga kerja yang profesional dalam pengelolaan kepariwisataan nasional. Hal ini untuk mewujudkan misi Pembangunan Nasional 2020-2024 yang dapat disebutkan sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera,
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing,
- c. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Permasalahan penting dalam pengelolaan SDM di Indonesia selain terletak pada tingginya tenaga kerja terdidik yang tidak terserap di dunia kerja, juga munculnya *misallocation of human resources*, yaitu adanya kesenjangan yang terjadi antara pasar tenaga kerja dan dunia pendidikan. Konsep keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara dunia pendidikan dan dunia kerja telah dikumandangkan sejak tahun 1990-an dan dicetuskan

Mendiknas Prof. Dr. Ing. Wardiman (Periode 1989-1998) telah mencanangkan program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia industri.

Link and match adalah penggalan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja kedepan. Diharapkan paradigma orientasi pendidikan tidak lagi *supply minded* tapi lebih *demand minded* (kebutuhan pasar). Program *link and match* meliputi dua sasaran, yaitu pada tingkat sekolah menengah, dan pada tingkat perguruan tinggi.

Khusus untuk sekolah menengah, sasaran program pemerintah (DEPDIKNAS) mengubah proporsi siswa SMU vs SMK 70:30, menjadi 30:70. Sementara itu, pada tingkat perguruan tinggi diharapkan adanya peran industri untuk menciptakan pelatihan-pelatihan khusus bahkan bekerjasama untuk mendirikan institusi sesuai dengan jenis industri yang dikembangkan (Soesilowati, 2009; 3-5)⁴.

3. Pendekatan *Penta Helix* untuk Pariwisata Indonesia

Daya saing kepariwisataan Indonesia saat ini menempati posisi 70 dunia, Indonesia naik 8 peringkat menjadi 42, dimana proyeksi pada 2019 akan naik menembus 30 besar dunia. Sejumlah kriteria yang naik peringkat antara lain, *business environment* naik tiga tingkat ke posisi ke-60, *healthy and hygiene* naik hanya satu tingkat ke 108, *international openness* naik drastis 55 peringkat menjadi 17. Ini karena kebijakan bebas visa kunjungan, dari 15 negara menjadi 169 negara. Kriteria lainnya, *prioritization travel and tourism* naik dari 15 ke 12, *environment sustainability*, meskipun masih di posisi 131 dari 134 dunia. Selanjutnya, *air transport infrastructure* membaik tiga peringkat, dari 39 ke 36, *ground and port infrastructure* naik dari 77 ke 69, *tourism service infrastructure* juga naik dari 101 ke 96, serta *natural resources* melejit dari 19 ke 14.

Seperti diketahui bahwa perkembangan pariwisata saat ini menargetkan dalam lima tahun ke depan 2019-2024 harus naik dua kali lipat. Tahun 2019 pariwisata memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar delapan persen, devisa yang dihasilkan Rp 280 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata sebanyak 13 juta orang, kunjungan wisatawan mancanegara

(wisman) 20 juta dan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Sementara, pemerintah menargetkan tahun 2020, adalah 12 juta kunjungan wisman dan 260 juta pergerakan wisnus, kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional sebesar lima persen, serta jumlah lapangan kerja yang diciptakan sebanyak 11,7 juta tenaga kerja.

Pembangunan pariwisata harus bersinergi maka diperlukan sebuah pendekatan yang disebut *Penta Helix*, bahwa pariwisata Indonesia menjadi tanggung jawab semua elemen, khususnya akademisi, pebisnis, komunitas, pemerintah, dan media.

Peningkatan kekuatan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata yang didukung oleh kemampuan profesionalisme SDA bidang kepariwisataan akan berdampak kepada penciptaan ketahanan nasional. Kondisi ini akan relevan dengan definisi terhadap ketahanan nasional yaitu kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya.

Melihat penjelasan latar belakang di atas, maka perlu dikembangkan model yang holistik dalam “Percepatan Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix* Guna Peningkatan Daya Saing Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional”. Pengembangan model ini, diharapkan akan mampu menjadi model dalam pengembangan pendidikan vokasi bidang pariwisata dalam mendukung sektor ekonomi lain di Indonesia.

4. Pokok Persoalan *Penta Helix*: Belum Optimal Sebagai Daya Saing Bangsa

Kepariwisata di Indonesia memiliki peluang untuk menjadi lebih maju melalui meningkatkan kapabilitas SDM yang berkompeten yang dihasilkan oleh implementasi pendidikan vokasi bidang pariwisata yang *link and match* terhadap kebutuhan industri kepariwisataan. Pengelolaan kepariwisataan

maupun pendidikan vokasi merupakan tanggung jawab seluruh *stakeholders* (*Penta Helix*) nasional yang diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing nasional serta penciptaan ketahanan nasional dari sektor ekonomi.

Walau demikian, pokok masalah yang ditemukan adalah pembangunan pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *Penta Helix* belum optimal dilakukan sehingga daya saing bangsa secara signifikan tidak meningkat bahkan cenderung stagnan sehingga dikhawatirkan tidak berdampak positif terhadap ketahanan nasional.

Dari penjelasan terhadap pokok masalah di atas, maka dapat diidentifikasi pokok persoalan yang dapat dideskripsikan dalam kertas kerja perorangan ini, sebagai berikut:

a. Manajemen Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Belum Optimal

Pengelolaan pendidikan atau yang sering disebut manajemen pendidikan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan secara sistematis, taat azas dan konsisten yang hingga saat ini belum dikelola secara baik. Kondisi ini berakibat pada proses pendidikan yang tentunya berimplikasi kepada hasil akhir yaitu kualitas lulusannya.

Masih rendahnya penerapan sistem manajemen pendidikan dapat terlihat pada ketersediaan tenaga dosen. Berdasarkan surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama nomor 4798/E.E2.3/KL/2015 tanggal 23 Juni 2015 telah ditetapkan minimal dosen yang harus dimiliki oleh prodi berdasarkan tingkat jenjang pendidikan yang dijalankannya. Namun kenyataan yang terjadi, saat ini terdapat kekurangan dosen maupun tenaga pendidikan pada pendidikan tinggi.

Berdasarkan data Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso pada 2015, dari jumlah mahasiswa yang mencapai 5,4 juta orang, jumlah dosen yang tersedia kurang dari 160.000 orang, sementara itu proporsi dosen tetap saat ini untuk lulusan S1 sebesar 34 %, S2 17%, sementara S3 hanya 11 %. Masih kurangnya dosen atau tenaga pendidik dapat menunjukkan masih rendahnya implementasi sistem manajemen pendidikan.

b. Kebijakan dan Regulasi dalam Pengelolaan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Belum Dilakukan Secara Terintegrasi

Era reformasi telah membawa perubahan dalam berbagai arah kehidupan bangsa Indonesia termasuk pada bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi yang dilegalkan oleh Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi sehingga menimbulkan konsekuensi logis terhadap manajemen pendidikan yang mana harus disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi. Dapat juga terjadi, seperti dinyatakan H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa “pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif tanpa penelitian lebih dulu.

c. Pengembangan Kurikulum Vokasi Bidang Pariwisata Belum Mampu Merespon Kebutuhan Industri Pariwisata.

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia secara umum saat ini dapat diidentifikasi bahwa belum ada kesesuaian hasil pendidikan (*output*) dengan kebutuhan dunia kerja. Sampai saat ini, secara umum bahwa pendidikan di Indonesia hanya dipersiapkan untuk memiliki kemampuan akademik, sedangkan industri/dunia kerja membutuhkan lulusan yang relevan dari keterampilan/skill. Kurikulum relevan dengan pengembangan potensi daerah.

Standar pelaksanaan pendidikan di Indonesia, hanya berpusat pada isi kurikulum, sedangkan keadaan dan kebutuhan potensi antarsuatu daerah tidaklah sama, akibatnya banyak potensi daerah yang belum dikembangkan oleh lulusan pendidikan.

d. Penerapan Standarisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata Belum Mengacu Kepada Standarisasi Global

Masih belum meratanya kualitas pendidikan secara nasional, dapat diakibatkan belum optimalnya implementasi delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi standar isi, pendidik, proses, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian. Apabila pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata akan mengacu kepada standar global, ada lima standar yang ditetapkan oleh *Unwto-Tedqual*.

Belum optimalnya implementasi delapan standar nasional pendidikan secara merata di Indonesia ditambah dengan lima standar global menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan secara nasional terutama pada pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Dari data Kemendikbud 2012, pada tahun 2025 perkiraan lulusan DIV/S1 dan diploma masing-masing hanya sebesar 8%, sementara data tertinggi pada lulusan SMP/MTs sebesar 22 %.

Data ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sampai dengan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional pada tahun 2025.

5. Pengertian dan Beberapa Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap kandungan penulisan buku ini, maka dirasa perlu menjelaskan pengertian dari beberapa istilah sebagai berikut:

- a. **Pendidikan vokasi**, merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan, baik magister terapan maupun bahkan doktor terapan (UU no 12 tahun 2012 pasal 16 ayat 1).
- b. **Penta helix**, *penta* adalah lima dan *helix* berarti unsur yang saling mengikat kuat. Penta helix merupakan lima ikatan unsur kuat yang saling mengikat satu sama lain yang terdiri dari unsur ABCGM, yaitu *Academician* (Akademisi), *Business* (Bisnis), *Community* (komunitas/ Masyarakat), *Government* (Pemerintah), dan *Media* (Arief Yahya, 2016). Model *penta helix* merupakan pengembangan dari model sebelumnya

- yaitu *triple helix* yaitu unsur pemerintah, industri dan universitas (Sabato and Mackenzi, 1982).
- c. **Pariwisata**, adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan daerah. (UU no 10 thn 2009).
 - d. **Daya saing**, adalah kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan suatu produk barang dan jasa yang memenuhi kriteria tertentu (internasional), dan kemampuan mewujudkan tingkat pendapatan yang tinggi secara berkelanjutan, serta meraih peluang kerja. (Nariomo, 2015; 433).
 - e. **Ketahanan Nasional**, adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47).

BAB II

PARADIGMA KETAHANAN NASIONAL DAN PENDIDIKAN VOKASI

1. Landasan Pemikiran

INDONESIA sejak 31 Desember 2015 berhadapan dengan tantangan besar kesepakatan pasar tunggal (ekonomi) dan basis produksi di wilayah ASEAN, dan penyatuan aspek sosial budaya, yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pendidikan tinggi berperan mengangkat daya saing bangsa, dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang profesional serta kompetitif (ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan berbahasa asing, teknologi informasi, penguatan karakter, dan kemampuan global). Penyusunan dan penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diikuti oleh *ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals Framework (ACCSTP)* menjadi momentum dalam membangkitkan kualifikasi SDM bidang kepariwisataan. Tersedianya SDM yang produktif, yang disiapkan untuk memenangkan kompetisi (memiliki tingkat kecerdasan, karakter, serta kualitas kebangsaan yang tinggi), yang disebut sebagai generasi emas, yang dipandu oleh KKNI dan ACCSTP serta didukung oleh partisipasi secara terintegrasi antar *stakeholders* akan menjadi harapan yang besar bagi tumbuhnya daya saing kepariwisataan.

Dalam persaingan global saat ini, istilah daya saing selalu menjadi wacana dalam kriteria penetapan suatu tujuan, termasuk dalam misi kedua

RRPJPN 2005-2025 “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing”. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti, dalam sambutannya saat acara Dies Natalis Universitas Terbuka ke-XXXI di Pondok Cabe, Tangerang, 2017, menyatakan, indikator kemampuan atau daya saing bangsa terletak pada faktor pendidikan tinggi dan inovasi karena hal tersebut menentukan seberapa kuat tingkat daya saing suatu bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat tergambarkan bahwa pokok masalah yang ditemukan adalah bahwa pembangunan pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *penta helix* belum optimal dilakukan sehingga menjadikan daya saing bangsa secara signifikan tidak meningkat bahkan cenderung stagnan yang dikhawatirkan tidak berdampak positif terhadap ketahanan nasional.

Berdasarkan itu menjadi penting menggunakan landasan berpikir yang bersumber dari paradigma nasional dan berbagai peraturan untuk mempercepat pembangunan itu.

2. Paradigma Nasional

Narimo, menyatakan, pendidikan tinggi berperan mengangkat daya saing bangsa, dengan memberikan bekal kepada lulusan berupa pengetahuan dan ketrampilan profesional yang kompetitif. Ia menegaskan, perguruan tinggi memiliki peran yang besar dalam perwujudan daya saing bangsa, karena perguruan tinggi merupakan pusat penggerak inovasi dan aplikasi teknologi, baik secara *entrepreneurship* maupun *technopreneurship*.

Paradigma nasional di sini terkait pengembangan pendidikan vokasi yang berbasis *penta helix* dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pancasila Sebagai Landasan Idiil.

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan merupakan hal penting dalam menjaga kelangsungan dan kehidupan bangsa. Pendidikan selain sebagai media transfer ilmu, juga merupakan media transfer ideologi negara. Dalam hal ini pendidikan suatu bangsa akan selalui mengikuti ideologi bangsa tersebut.

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah pandangan hidup yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang dijiwai dari sila-silanya.

Percepatan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dalam kaitan dengan sila pancasila terdapat dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fokus keadilan di sini adalah untuk mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

b. Undang - Undang Dasar Negara RI sebagai Landasan Konstitusional.

UUD 1945 yang merupakan falsafah negara Indonesia, telah menjadikan pendidikan sebagai salah satu hal dalam pembangunan negara. Misal dalam pasal 31 dan 32. Pasal 31 ayat 1 berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 pasal ini berbunyi: Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 pasal ini berbunyi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional.

Pasal 32 ayat 1 bermaksud memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Sementara ayat 2 menyatakan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional.

Pasal ini berhubungan dengan pendidikan sebab pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan nasional diarahkan guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta kualitas SDM.

Tentu juga meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menciptakan manusia Indonesia berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang berdasarkan pancasila.

Pendidikan secara eksplisit dalam tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...” Pernyataan “mencerdaskan kehidupan bangsa” merupakan hasil akhir dari

pendidikan, sehingga pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam menghasilkan anak bangsa yang unggul.

c. Wawasan Nusantara sebagai Landasan Visional.

Wawasan nusantara merupakan cara pandang serta visi nasional sehingga harus dipergunakan sebagai arahan, acuan, pedoman, dan tuntutan bagi seluruh individu bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan, pelaksanaan, atau implementasi wawasan nusantara harus tercermin pada pola sikap, serta tindakan yang selalu dan senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan NKRI, daripada kepentingan kelompok atau pribadi. Dalam konteks pendidikan vokasi bidang pariwisata, penerapan wawasan nusantara harus tercermin dari pola pikir, sikap, dan tindakan dalam meningkatkan kapasitas kepariwisataan nasional secara profesional dan berstandar global tanpa melupakan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan yang merupakan identitas bangsa.

d. Ketahanan Nasional sebagai Landasan Konsepsional.

Sama seperti pendidikan vokasi, kepariwisataan saat ini menjadi tren ekonomi global maupun nasional, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data BPS 2017, pada Juni 2017 jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 6,430,000 orang dengan tingkat penghunian kamar sebesar 51.02 % (hotel berbintang di 34 provinsi) dengan rata-rata menginap sebesar 1,92 hari. Adapun persentase terbesar wisatawan mancanegara secara geografis berasal dari Tiongkok (14.19%), Singapura (11,66%), Australia (9,57%), Malaysia (8,13%), dan India (4,51%) sebagaimana dijelaskan pada data berikut:

PERKEMBANGAN PARIWISATA JUNI 2017

Berita Resmi Statistik No. 71/08/Th. XX, 01 Agustus 2017

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

2017



Asal & Kebangsaan Wisatawan Mancanegara Juni 2017

Kebangsaan	Persentase (%)
Tiongkok	▲ 14,19
Singapura	▲ 11,66
Australia	▲ 9,57
Malaysia	▼ 8,13
India	▲ 4,51

51,02%
Tingkat Penghunian Kamar (TPK)
hotel berbintang di 34 provinsi



1,92 hari
Rata-rata lama menginap
tamu asing dan Indonesia
pada hotel berbintang di 34 provinsi

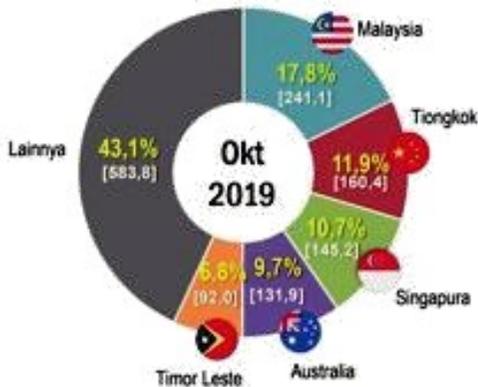
BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Kunjungan Wisman ke Indonesia menurut Kebangsaan



Kebangsaan Wisman

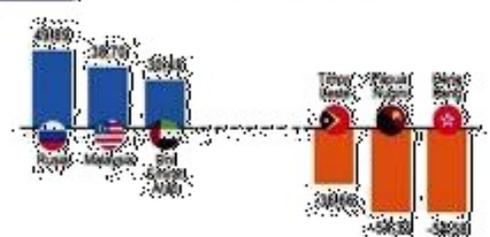
Dari 1,35 juta kunjungan wisman pada Oktober 2019, paling banyak berasal dari negara Malaysia sebesar 241,1 ribu kunjungan (18 persen)



Keterangan: [...] dalam ribu kunjungan

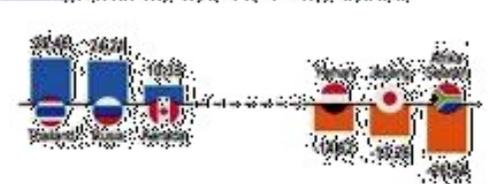
y-on-y

Peningkatan & Penurunan Terbesar



m-to-m

Peningkatan & Penurunan Terbesar



Data ini mengalami perubahan pada Oktober 2019 bahwa dari 1,35 juta kunjungan wisman paling banyak berasal dari negara Malaysia sebesar 241, kunjungan atau 18 %. Urutan berikut adalah Tiongkok sebesar 160,4 atau 11,9 %, diikuti Singapura 145,2 atau 10,7 %, Australia sebanyak 131,9 atau 9,7 %, dan Timor Leste sebanyak 92,0 atau 6,8 %.

2. Target wisman pada 2017 (14.851.534), 2018 (17.236.690), dan pada 2019 (20,004,902). Hal ini tergambar dari data berikut:



Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman, 2014-2018



Tabel Jumlah Kunjungan Wisman, 2014-2018

Tahun	Bulan												Jan-Des
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2014	753 079	702 666	765 607	726 332	752 363	851 475	777 210	826 821	791 296	808 767	764 461	915 334	9 435 411
2015	771 066	833 000	827 069	787 282	838 030	858 359	860 703	895 420	905 806	861 505	820 669	971 866	10 230 775
2016	814 303	888 309	915 019	901 095	915 206	857 651	1 032 741	1 031 986	1 006 653	1 040 651	1 002 333	1 113 328	11 519 275
2017	1 107 968	1 023 388	1 059 777	1 171 386	1 148 588	1 144 001	1 370 591	1 393 243	1 250 231	1 161 565	1 062 030	1 147 031	14 039 799
2018	1 100 677	1 201 001	1 363 339	1 300 277	1 242 588	1 318 094	1 540 549	1 510 764	-	-	-	-	10 577 289

Keterangan : Kolom (14) pada tahun 2018 merupakan jumlah kunjungan wisman pada bulan Januari – Agustus 2018

Sementara itu, data terbaru menunjukkan kunjungan wisman dari 2014 -2019 terus meningkat. Ada bulan-bulan tertentu yaitu Januari-Oktober di mana wisman memilih Indonesia sebagai tempat wisata. Sementara bulan November dan Desember kenaikan tidak signifikan. Misal, data khusus dari bulan Januari-Oktober 2019, jumlah kunjungan wisman meningkat 2,85 % dibandingkan Januari-Oktober 2018. Hal ini dapat dicermati pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS

Data terbaru BPS pada September 2019 yang dirilis dari Berita Resmi Statistik No. 86/11/Th, 1 November 2019 dijelaskan bahwa dari bulan Januari- September 2019 mengalami kenaikan 12, 27 atau sekitar 2, 63 % dibandingkan bulan Januari- September 2018 yaitu sekitar 11, 98. Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia juga dapat dihitung lewat pintu masuk udara, laut, dan darat. Pada September 2019, data sementara wisman yang masuk lewat udara sekitar 902, 19 ribu kunjungan; pintu laut sekitar 332, 32 ribu kunjungan; dan pintu darat sekitar 165, 86 ribu kunjungan.

Tingginya pertumbuhan perkembangan kepariwisataan nasional, tentu berimplikasi terhadap kebutuhan tenaga terampil. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gede Pitana, menyatakan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 2,5 juta tenaga kerja bidang pariwisata dalam lima tahun mendatang di mana 70% di antaranya untuk tingkatan pekerja vokasi.

Data BPS Kementerian Ketenagakerjaan, tahun 2016 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,03 juta orang pada Agustus 2016. Tak dipungkiri bahwa berkurangnya angka pengangguran karena dipicu perkembangan di sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan merendahnya tingkat pengangguran serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka akan memperkuat ketahanan nasional.

Data BPS 2016 tentang pangangguran terbuka ini tentu berbanding terbalik dengan data dari Kemenpar 2018 terkait wajah dunia pariwisata di Indonesia. Setiap tahun pariwisata Indonesia terus melesat. Pertumbuhan sektor pariwisata terus melejit dalam lima tahun terakhir.

Hal ini tentu berdampak positif pada sumbangan devisa yang kian meningkat bagi negara. Bila SDM tidak mampu mengimbangi kebutuhan pariwisata ini maka strategi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pariwisata dunia percuma.

Dari data dapat digambarkan ada empat destinasi super prioritas di Indonesia. Empat destinasi “Bali baru” itu adalah Danau Toba, Candi Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kinerja apik sektor pariwisata menjadi daya saing yang mampu mendatangkan devisa bagi negara. Pada 2018, penerimaan devisa negara berkisar 16,11 miliar dibandingkan empat tahun sebelumnya.

Gambaran pariwisata yang melejit juga dapat dilihat dari presentasi kunjungan. Dari tahun 2009-2013 ada sekitar 39,2 % kunjungan wisman ke Indonesia. Angka ini berubah drastis pada 2014-2019 yaitu 67,6 %. Masyarakat Indonesia bila tidak memiliki SDM yang unggul maka tidak membantu pemerintah dalam meningkatkan sisi pariwisata yang kian hari meningkat.



Sumber: Kemenpar

3. Peraturan Perundang-Undangan.

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003

Undang-undang no 20 tahun 2003 merupakan kebijakan yang membahas tentang sistem pendidikan nasional yang merupakan pengganti UU no 2 tahun 1989. Beberapa pasal yang menjadi dasar dalam penyusunan kertas kerja perorangan ini meliputi:

Pasal 1 ayat 1 yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pasal 1 ayat 2 pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 13 menjelaskan tentang jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”, dan “diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

Pasal 14 menjelaskan tentang jenjang pendidikan sebagai tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Dalam penjelasan pasal 15 dipeberikan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Pendidikan vokasi merupakan bentuk pendidikan yang dalam kurun waktu lima tahun ke belakang menjadi bentuk pendidikan yang mampu menciptakan SDM siap kerja.

Perubahan paradigma dari pendidikan berbasis keilmuan menjadi pendidikan vokasi dikarenakan tingginya kebutuhan industri terhadap tenaga terampil terutama pada industri jasa.

b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik jasmani maupun rohani, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional undang-undang pendidikan tinggi.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi memberikan legalitas terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi:

- 1) Perluasan dan jaminan akses
- 2) Pengembangan Tridarma perguruan tinggi
- 3) Kesetaraan
- 4) Penguatan pendidikan vokasi
- 5) Keutuhan jenjang pendidikan
- 6) Otonomi perguruan tinggi
- 7) Sistem penjaminan mutu
- 8) Tanggung jawab negara dalam menghindari liberalisasi dan komersialisasi perguruan tinggi

Paradigma baru tentang pendidikan nasional pasca reformasi mengedepankan otonomi pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Hal ini berdampak pada mahalnya akses memperoleh pendidikan.

Pembahasan UU no 12 tahun 2012 dalam kertas kerja perorangan akan fokus kepada pendidikan vokasi, yang mana didefinisikan sebagai pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (pasal 16 ayat 1).

Ayat 2 dalam pasal ini menyatakan bahwa pendidikan vokasi dapat dikembangkan oleh pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Dalam penjelasan pasal 16 dijelaskan “pendidikan vokasi” adalah pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi agar memenuhi syarat kompetensi. Dengan demikian pendidikan vokasi telah mencakup pendidikan profesi.

Dalam pasal 59 penyelenggaraan pendidikan vokasi dapat dilakukan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Hal ini bisa terekam dalam bagan berikut:



4. Landasan Teori

Landasan yang digunakan dalam konsepsi optimalisasi kewirausahaan sektor pariwisata budaya guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka tujuan nasional adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Vokasi.

Pendidikan vokasi memiliki prinsip-prinsip dasar (Miller, 2005 dalam Sanatang) yang menyatakan bahwa kurikulum dalam pendidikan vokasi harus berdasar kepada kebutuhan pasar (industri) dan dunia kerja. Inovasi adalah bagian dari vokasi serta pendidikan vokasi harus menghasilkan lulusan yang kompeten (ahli di bidangnya).

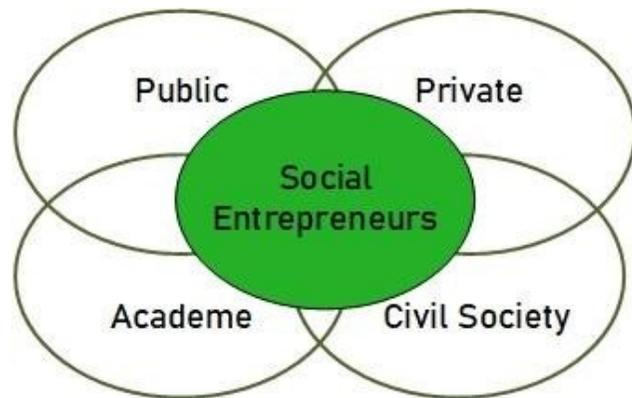
Power (1999) dalam Herminarto dkk⁷ menyatakan bahwa pendidikan vokasi berkaitan dengan jenjang pendidikan berkaitan langsung dengan kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi pekerja di bidang rekayasa maupun industri jasa. Pendidikan vokasi harus mampu memenuhi pengetahuan masyarakat (*knowledge society*) pada era ekonomi kreatif.

b. Penta Helix

Muhyi, dkk, (2016:413) mendefinisikan *penta-helix model* “is based on five stakeholder types: businesses, public administration, local residents, the knowledge sector and capital. The model is very useful for multi stakeholders problem areas where stakeholders represent a range of interests on a site or problem.”

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa model *penta helix* diimplementasikan pada persoalan-persoalan yang membutuhkan pemecahan yang bersifat multidisiplin dan multi *stakeholders*.

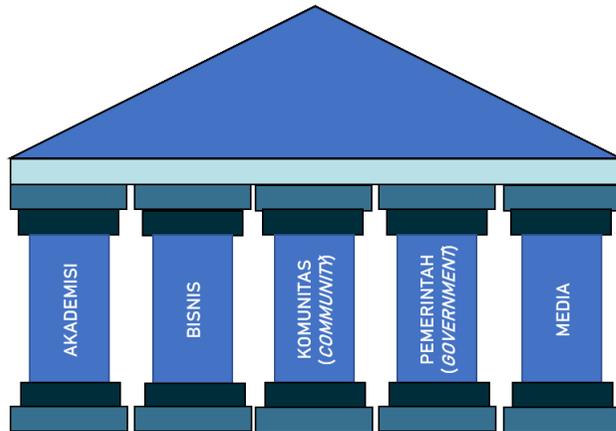
Berdasarkan Halibas, dkk, (2017:161)⁸ menyatakan bahwa *penta-helix model* dikembangkan dari konsep *triple helix* Etzkowitz and Leyesdorff 's (2000) yang terdiri dari akademik, industri, dan pemerintah. Calzada, 2016 dalam Halibas dkk,2017;162 membagi *penta helix model* yang dikembangkan sebagai berikut: *social entrepreneurs, public, private, academe, civil society* seperti gambar berikut:



Sumber: Calzada, 2016 dalam Halibas dkk,2017;162

Menteri Pariwisata Republik Indonesia Dr Ir Arief Yahya (2012-2014) dalam pengembangan kepariwisataan nasional mengembangkan konsep *penta helix* yang meliputi: akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media.

SKEMA KOLABORASI PENTAHELIX PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA



Sumber: Kementerian Pariwisata, 2015

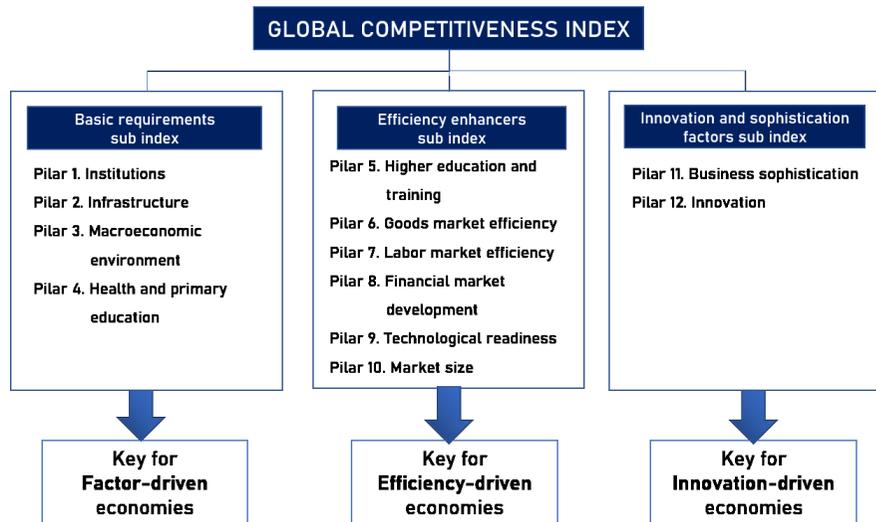
Perubahan model *penta helix* yang dikembangkan oleh Menteri Pariwisata adalah dengan mengganti *social enterpreuner* dengan media. Dalam model yang dikembangkan Calzada, 2016 merupakan konsep *penta helix* dalam pengelolaan sosial ekonomi wilayah, pariwisata sebagai sebuah aktivitas ekonomi murni yang bersifat *itangible* maka peran media dibutuhkan dalam meningkatkan *awarness* konsumen/calon wisatawan terhadap destinasi pariwisata di Indonesia. Menteri Pariwisata menegaskan dalam Rapat Koordinasi Nasional 2016 bahwa, “Sinergi yang disebut dengan *penta helix* menjadi kunci mengembangkan pariwisata Indonesia, khususnya dalam mewujudkan target tahun 2016 hingga 2019”.

c. Teori Daya Saing

Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep *comparative advantage*, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi *advantage* di sini adalah situasi yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin».

Berdasarkan Narima, 2015;433, disebutkan bahwa daya saing adalah kemampuan suatu bangsa untuk menciptakan suatu produk barang dan jasa yang memenuhi kriteria tertentu (internasional), dan kemampuan mewujudkan tingkat pendapatan yang tinggi secara berkelanjutan, serta meraih peluang kerja. Disadari bahwa posisi daya saing suatu bangsa menunjukkan tingkat keunggulannya dibandingkan dengan bangsa lain.

World Economic Forum (WEF) dikelompokkan ke dalam 12 pilar daya saing, yaitu: (1) institusi, (2) infrastruktur, (3) makro ekonomi, (4) kesehatan dan pendidikan dasar, (5) pendidikan tinggi, (6) efisiensi pasar barang, (7) efisiensi pasar kerja, (8) pasar keuangan, (9) kesiapan teknologi, (10) besaran pasar, (11) kecanggihan bisnis, dan (12) inovasi. Selanjutnya ke 12 pilar tersebut dikelompokkan kedalam tiga kelompok pilar, yaitu kelompok persyaratan dasar, kelompok penopang efisiensi, dan kelompok inovasi serta kecanggihan bisnis. Lihat gambar berikut:



Sumber: World Economic Forum

Pendidikan tinggi merupakan salah satu yang dijadikan indikator daya saing seperti yang dikemukakan oleh WEF. Beberapa indikator global yang mana pendidikan tinggi dijadikan sebagai salah satu indikator dalam penetapan daya saing yaitu: 1) *Human Development Index* (UNDP), 2) *Education for All Global Monitoring Report* (UNESCO), 3) Angka partisipasi keikutsertaan dalam sains (TIMMS).

d. Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarahnya dapat menjaga keberlangsungan dengan menggunakan suatu konsep yang dikenal dengan ketahanan nasional. Dengan konsep ini, Indonesia dapat mengatasi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung. Di masa depan ketahanan nasional harus selalu dipelihara dan dikembangkan karena terbukti efektif untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara (Sunardi, 2004).

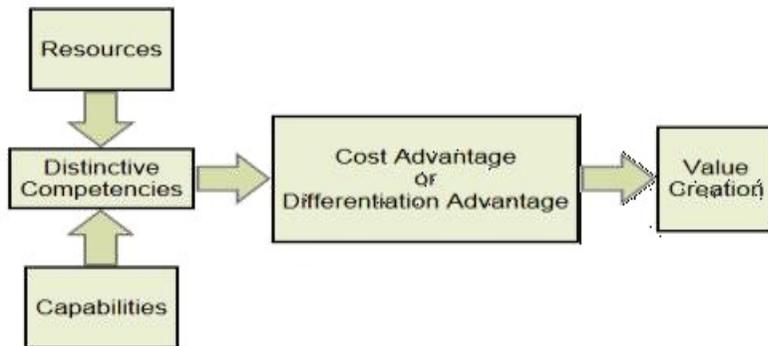
5. Beberapa Kajian Kepustakaan Terkait Pembangunan

Pembangunan merupakan proses perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam memberikan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan budaya yang ada secara rasional dengan berpedoman “ekonomi berbasis konstitusi” menuju Indonesia yang mandiri, berkeadilan, dan berdaya saing dalam menghadapi perubahan zaman untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat¹⁰. Berdasarkan hal tersebut maka memperhatikan kajian berikut:

a. *Competitive Advantage*¹¹.

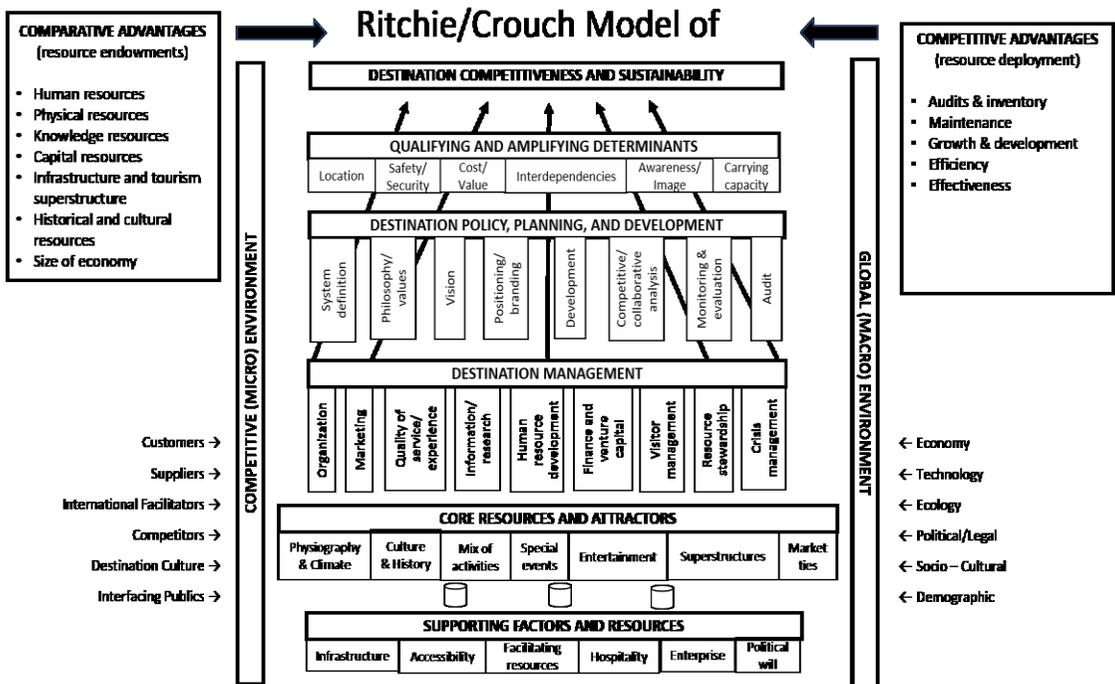
Keunggulan bersaing pada dasarnya berkembang dari nilai yang mampu diciptakan oleh sebuah perusahaan bagi pembelinya yang melebihi biaya, perusahaan. Porter menjabarkan terdapat dua jenis keunggulan bersaing yang perlu diciptakan oleh perusahaan yaitu keunggulan biaya dan keunggulan diferensiasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah ini:

A Model of Competitive Advantage



Sumber daya manusia menurut Porter merupakan salah satu bentuk dalam sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan membentuk nilai rantai dari sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan usaha.

- b. *The Competitive Destination a Sustainable Tourism Perspective*¹² *Destination competitiveness* terbentuk dari *comparative* dan *competitive* advantage, faktor-faktor yang terdiri dari global (macro) *environment* dan *competitive* (micro) *environment*, serta komponen-komponen yang terdiri dari *core resources and attractors*; *supporting factors and resources*; *destination management*; *destination policy, planning and development*; dan *qualifying and amplifying determinant*. Hal ini terangkum dalam daya saing destinasi pariwisata pada gambar berikut:



Perubahan *comparative advantage* menjadi *competitive advantage* adalah kunci utama dalam pembentukan *destination competitiveness* dimana terciptanya *competitive advantage* adalah syarat terwujudnya *destination competitiveness* yang memiliki daya saing wisata.

Adapun pengidentifikasian *competitive advantage* adalah melalui *core competencies* berdasarkan penilaian sumber daya dan kapabilitas serta pengukuran performa daya saing wisata melalui *destination performance index*.

c. Ketahanan Nasional¹³

Dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia dibutuhkan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam aspek dan dimensi kehidupan nasional yang disebut ketahanan nasional.

Konsep ketahanan nasional merupakan kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Dalam konteks pengembangan

pendidikan vokasi bidang pariwisata yang menjadi topik dalam penyusunan kertas kerja perorangan, dalam konteks implementasi kebijakan bidang pendidikan dalam menghadapi era globalisasi dan perkembangan IPTEK dapat disebutkan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan akademik dan kesejahteraan tenaga kependidikan agar berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti.
- 2) Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

1. Gambaran Umum

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan *change, movement* dan *adjustment*, daya saing suatu negara dianggap sebagai salah satu sumber ketahanan negara dalam menghadapi rintangan maupun tantangan membangun peradaban bangsa.

Kekuatan ekonomi, politik, budaya yang unggul, dan daya saing menjadi hal penting dalam membangun kelanjutan perekonomian serta peradaban suatu bangsa. Dari uraian di atas, maka akan muncul pertanyaan dari mana datangnya kekuatan daya saing tersebut?

Berdasarkan sejarah perekonomian, munculnya daya saing suatu negara terjadi karena kemampuan memproduksi barang (*tangible* dan *intangible*) yang unik serta perdagangan ini yang membuat kemajuan negara.

Dalam konteks memproduksi barang yang unik, Indonesia saat ini mulai untuk mengubah paradigma ekonomi dari ketergantungan terhadap gas dan bumi menjadi menjual sumber daya yang dimiliki melalui modifikasi dan konservasi yang disebut sebagai Pariwisata. Dalam Rakornas Pariwisata 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya (2012-2014) menyatakan, pada 2019 akan terdapat dua kriteria ekonomi nasional yaitu: pariwisata dan nonpariwisata. Pembangunan pariwisata nasional ini membutuhkan SDM yang memiliki

kualifikasi dan kompetensi yang tinggi, oleh karena itu pendidikan berbasis vokasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan SDM bidang pariwisata.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara Kementerian Pariwisata, I Gede Pitana, 2017, mengatakan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 2,5 juta tenaga kerja bidang pariwisata dalam lima tahun mendatang di mana sekitar 70 % di antaranya untuk tingkatan pekerja vokasi.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Strategis Global

Dari tahun ke tahun, globalisasi semakin mempengaruhi seluruh struktur kehidupan manusia termasuk Indonesia, tentu harus mengantisipasi arus globalisasi tersebut. Maka berbicara soal pendidikan vokasi bidang kepariwisataan maka isu globalisasi pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Spesialisasi Pendidikan.

Mengacu kepada *trend global* terhadap isu kekuatan ekonomi dunia yang disebut E-7 (Brazil, China, India, Indonesia, Mexico, Russia dan Turki) yang disinyalir akan menggantikan kekuatan G7 pada 2030 (Yang S, PwC Global Annual Review, 2014;7).

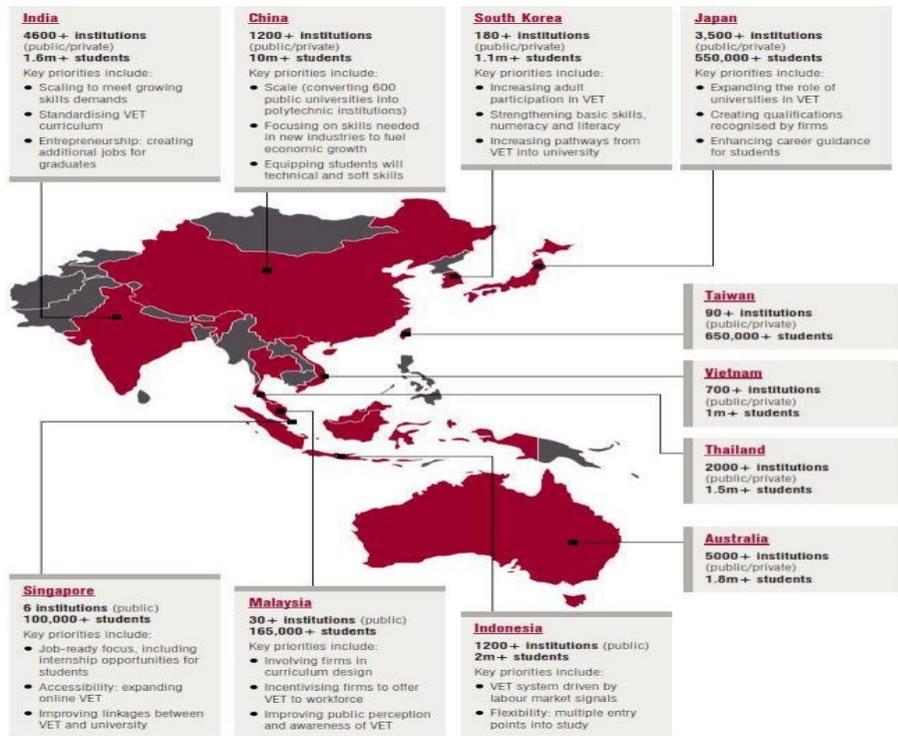
Mengacu kepada hal di atas, maka kebutuhan tenaga kerja terampil semakin dibutuhkan dalam mengembangkan perekonomian serta transisi menuju *high value industries*.

Berdasarkan prediksi dari Dandolopartners, 2015, kedepannya sebanyak 21 % lembaga pendidikan akan menuju ke *Vocational Education and Training* (VET). Laporan Dandolopartners juga memberikan analisis terkait dengan perkembangan pendidikan vokasi yaitu:

- a. Hampir 2/3 ramalan pertumbuhan tenaga kerja di Eropa akan merujuk kepada kategori teknisi dan *associate professional*.
- b. Hampir 2/3 lowongan pekerjaan tahun 2018 terkait dengan kebutuhan kualifikasi “*post -secondary*” di bawah diploma 4.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Dandolopartners, 2015 juga telah memberikan gambaran terkait dengan pelaksanaan VET di

beberapa negara termasuk Indonesia, yang dideskripsikan pada gambar berikut:



Sumber: Dandolopartners, 2015

Secara garis besar dapat disebutkan berdasarkan urutan dan angka yaitu:

1. India 4.800 lembaga pendidikan vokasi
2. Tiongkok 1.200 lembaga pendidikan vokasi
3. Korea Selatan 180 lembaga pendidikan vokasi
4. Jepang 3.500 lembaga pendidikan vokasi
5. Taiwan 90 lembaga pendidikan vokasi
6. Vietnam 700 lembaga pendidikan vokasi
7. Thailand 2.000 lembaga pendidikan vokasi
8. Australia 5.000 lembaga pendidikan vokasi
9. Singapura 6 lembaga pendidikan vokasi
10. Malaysia 30 lembaga pendidikan vokasi
11. Indonesia 1.200 lembaga pendidikan vokasi

2. Kompetisi Global

Kesiapan suatu bangsa dalam menghadapi interaksi persaingan pasar internasional dapat ditunjukkan dengan kapasitas bangsa tersebut. Hal itu dilihat dari kemampuan daya saingnya. Daya saing Indonesia merosot dari peringkat ke-37 tahun lalu menjadi peringkat ke-41 tahun ini dari 138 negara. Kendati pengembangan sektor keuangan dinilai cukup baik, yakni naik tujuh peringkat, Indonesia anjlok 20 peringkat dalam kesehatan dan pendidikan dasar. Secara keseluruhan, skor Indonesia 5,42 didasarkan kepada 12 pilar daya saing yaitu:

The 12 Pillars of Competitiveness



Laporan Indeks Daya Saing Global 2016-2017 dalam Forum Ekonomi Dunia (WEF), kemarin, menyebutkan, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia ada di peringkat ke-91. Itu karena penetrasi TIK di Indonesia masih sangat rendah.

Namun, dalam konteks kepariwisataan berdasarkan *The Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2017 World Economic Forum (WEF) 2017*, Indonesia naik 8 peringkat dari posisi 50 besar dunia ke peringkat 42. Perubahan besar ini merupakan prestasi kedua Kementerian Pariwisata yang mendongkrak daya saing pariwisata Indonesia dari urutan 70 ke 50 pada tahun 2015.

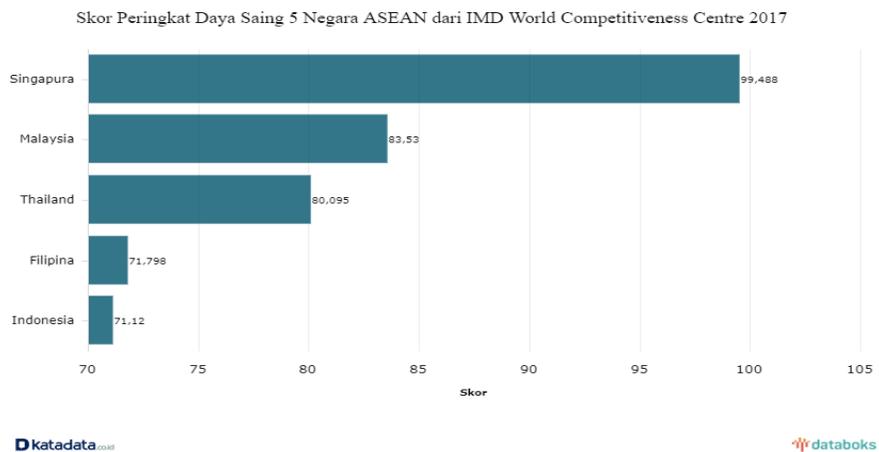
Dari 14 elemen yang dikalibrasi oleh TTCI terdapat tiga elemen yang pada tahun 2015 menempatkan Indonesia di peringkat di atas 100 dari 141 negara. Ketiganya, yakni *environmental sustainability* peringkat 134, *health and hygiene* (109), serta *tourist service infrastructure* (101).

Apabila mengacu kepada daya saing pariwisata di wilayah ASEAN terdapat hal menarik, yaitu Indonesia naik 8 peringkat menjadi 42, Malaysia turun satu peringkat menjadi 26,

Singapura juga anjlok 2 peringkat, sedangkan Thailand naik 1 level ke peringkat 34. Dalam hal ini Indonesia memiliki peluang besar untuk naik pada peringkat 30 pada tahun 2019¹⁴.

b. Lingkungan Strategis Regional

Perangkingan daya saing lain, menempatkan Indonesia dalam *IMD World Competitiveness Centre 2017* mencatat kenaikan enam level ke posisi 42, dari tahun sebelumnya di urutan 48. Dalam laopran tersebut daya saing Indonesia memperoleh skor 71,116.

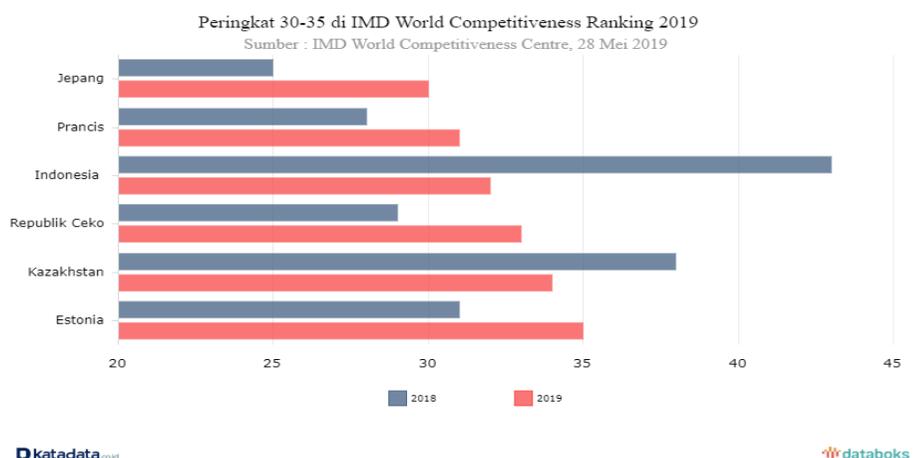


Namun begitu, kenaikan ini belum mampu mendongkrak Indonesia dari posisi buncit dari lima negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN 5 (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia).

Secara regional, lokasi Indonesia yang terletak di Asia Tenggara tergabung dalam ASEAN yang terdiri dari sepuluh negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Pada akhir 1997 dicapai kesepakatan tentang pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dimulai tahun 2015. Kesepakatan ini selain berdampak positif kepada seluruh sektor namun akan berpengaruh negatif bila tidak adanya kesiapan.

Tahun 2018, *IMD World Competitiveness Centre* mengeluarkan peringkat daya saing Indonesia di antara negara-negara dunia. Sebuah perubahan yang signifikan karena Indonesia mengalami perkembangan membaik, naik 11 level peringkat 32 dunia. Hal ini dapat dilihat dari urutan peringkat 30-35 daya saing dunia pada gambar berikut ini:



Dari data-data ini dapat disebutkan bahwa sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menjadikan suatu negara memiliki nilai kompetitif dengan negara-negara lain khususnya ASEAN.

Tabel 3. Peringkat IPM Negara di Kawasan ASEAN

Peringkat di ASEAN	Negara di ASEAN	Rank IPM 2014	Skor IPM 2014	Rata-rata Lama Waktu Sekolah 2014 (tahun)
1	Singapura	11	0.912	10.6
2	Brunei	31	0.856	8.8
3	Malaysia	62	0.779	10.0
4	Thailand	93	0.726	7.3
5	Indonesia	110	0.684	7.6
6	Filipina	115	0.668	8.9
7	Vietnam	116	0.666	7.5
8	Timor Leste	133	0.595	4.4
9	Laos	141	0.575	5.0
10	Kamboja	143	0.555	4.4
11	Myanmar	148	0.536	4.1

Sumber: Disarikan dari laporan tahunan UNDP tahun 2015

Keterangan: Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasar tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak

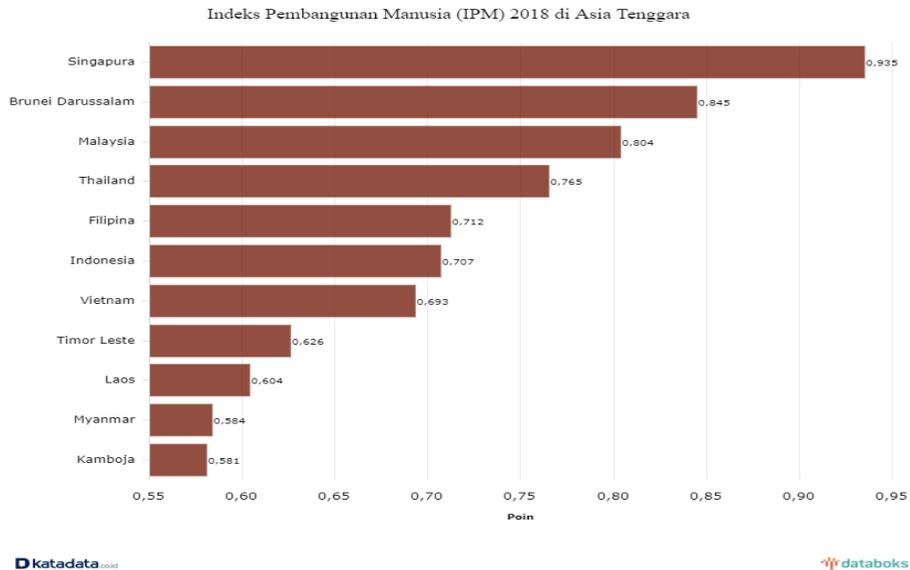
Indonesia menempati peringkat ke-90 di antara negara kawasan Asia Pasifik dalam *Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2017*. Posisi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia yang masing-masing duduk di posisi ke 2 dan 28 pada 2019. Vietnam dan Srilanka berada di atas Indonesia dengan rangking 86 dan 82.

GTCI adalah laporan tahunan yang diukur berdasarkan kemampuan suatu negara dalam bersaing mencetak bakat dan kemampuan (SDM).

Di Asia Tenggara, Indonesia masuk dalam kategori pembangunan tinggi. *United Nations Development Programme (UNDP)* memberikan skor 0,707 untuk indeks ini. Dengan skor ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada di peringkat enam di Asia Tenggara.

Menurut Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Christophe Bahuet, masuknya Indonesia dalam kategori tersebut dikarenakan komitmen nasional yang kuat untuk membangun manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Namun, Indonesia masih perlu mengurangi dan mengantisipasi ketimpangan pada masa mendatang.

UNDP sendiri membedakan skor IPM dengan kategori sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Indonesia, Thailand, dan Filipina masuk kategori tinggi. Sementara kategori sangat tinggi adalah Singapura, Brunei Darusalam, dan Malaysia. Sedangkan Timor Leste, Laos, Myanmar, dan Kamboja termasuk dalam kategori pembangunan menengah.



Sementara itu terkait dengan kesiapan SDM bidang kepariwisataan, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Kementerian Pariwisata RI, Prof Dr H M Ahman Syah, dalam acara Kuliah Umum Kesiapan SDM Bidang Pariwisata dalam Menghadapi Persaingan Global, 2016, menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata Indonesia masih berada di peringkat kelima, tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina.

Pengembangan SDM melalui pendidikan merupakan hal yang sangat dalam mempersiapkan dan menciptakan SDM terampil, peka dan kritis dalam menghadapi tantangan maupun perubahan-perubahan yang akan terjadi di dunia pendidikan mendatang.

Tantangan lain yang harus dihadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada konteks pendidikan adalah peningkatan jumlah lembaga pendidikan asing serta orientasi pendidikan yang semakin pro pasar serta meningkatnya tenaga kerja asing.

Maka dari itu, pemerintah harus mampu memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia agar mampu menciptakan sumber daya yang

kompeten dan mampu bersaing dalam menghadapi MEA yang telah dimulai pada 2015.

3. Faktor Internal

a. Restrukturisasi Pendidikan Nasional.

Pendidikan merupakan hal penting dalam peningkatan kualitas suatu bangsa, di mana dalam UUD pasal 31 ayat 4 tercantum, “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan nasional.” Hal ini juga terekam dalam tabel Pembagian Dana APBN bidang pendidikan untuk kementerian terkait:

Kementerian	APBNP 2015	APBN 2016	Selisih
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Rp53,3 triliun	Rp49,2 triliun	Rp4,1 triliun
Kementerian Agama	Rp60,3 triliun	Rp57,1 triliun	Rp3,2 triliun
Kemenristek Dikti	Rp43,6 triliun	Rp40,6 triliun	Rp3 triliun

Sumber: BIB 2016, hal.21

Sementara itu, bisa juga dibaca pada data presentasi penggunaan anggaran APBN untuk bidang pendidikan tahun 2013-2016 berikut:



Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir (2014-2019) menyampaikan fakta bahwa saat ini terdapat 4.498 perguruan tinggi di Indonesia dengan 25.548 program studi.

Dalam penyiapan SDM yang kompetitif bukan sebuah pekerjaan atau tugas yang mudah, namun apabila pendidikan di Indonesia mampu membekali siswa dengan pengetahuan serta keterampilan yang memadai, maka lulusan pendidikan Indonesia akan memiliki rasa percaya diri serta motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri secara optimal, sehingga mampu bersaing secara global.

Namun demikian pengelolaan pendidikan di Indonesia masih memiliki banyak persoalan yang antara lain keterbatasan akses kepada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, juga mutu guru yang masih kurang.

Persoalan-persoalan ini pada umumnya terjadi di daerah sehingga berimplikasi kepada arus urbanisasi dalam mendapatkan ilmu yang lebih baik di wilayah perkotaan.

Pengembangan pariwisata di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah no 24 tahun 1979 yang isinya penyerahan 12 urusan kepariwisataan ke daerah tingkat I. PP ini kemudian diikuti oleh penetapan sepuluh daerah tujuan wisata yang terdiri dari: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Namun demikian pengembangan SDM pariwisata telah dimulai sebelum tahun 1979 yang ditandai dengan berdirinya Sekolah Kejuruan Perhotelan pada 1959. Peristiwa ini merupakan cikal bakal berdirinya Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, institusi pendidikan tinggi kepariwisataan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata.

Selain STP Bandung, Kementerian Pariwisata membina lima pendidikan tinggi kepariwisataan yang berlokasi di Bali, Medan, Makasar, Palembang, dan Lombok.

Deputi Menteri Pariwisata Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan Bapak Prof. Dr. H.M. Ahmad Sya, 2017, menyatakan bahwa saat ini jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata

berjumlah 891 buah, Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi Pariwisata berjumlah 137 buah di seluruh Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kepariwisataan nasional telah menjadi salah satu poros utama dalam pembangunan SDM di Indonesia. Kementerian Pariwisata menargetkan daya saing SDM Indonesia pada 2018 mampu menduduki peringkat pertama di kawasan ASEAN, sehingga mampu bersaing menghadapi MEA. Ahman Sya menambahkan, pada 2015 daya saing SDM pariwisata Indonesia berada pada urutan lima di tingkat ASEAN di bawah Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Rakornas SMK Pariwisata se – Indonesia, 2016 lanjutnya, pada 2017 daya saing SDM pariwisata Indonesia ditargetkan mampu berada di peringkat ke-3 ASEAN, bahkan pada 2018 bisa di urutan pertama.

b. Gatra Geografis

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km (mencakup daratan dan lautan) dengan luas daratan 1.919.440 km dan lautan seluas 3.273.810 km . Dengan luas seperti ini, maka sudah dapat dibayangkan ketimpangan ekonomi termasuk pada ketimpangan penyelenggaraan pendidikan.

c. Gatra Demografi

Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 261,1 juta jiwa merupakan jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Rata-rata usia penduduk Indonesia adalah 28.6 tahun (perkiraan tahun 2016). Ini adalah *median age* yang berarti separuh dari populasi Indonesia berusia 28.6 tahun ke atas dan separuhnya lagi di bawah 28.6 tahun.

Mengenai jenis kelamin, rata-rata *median age* wanita Indonesia adalah 29.1 tahun, sementara *median age* pria lebih muda setahun (28.1 tahun). Secara demografi juga tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD (40%) dan lulusan SMA sebesar

16%¹⁵. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas tenaga kerja nasional meskipun memiliki jumlah penduduk yang besar.

d. Gatra Sumber Kekayaan Alam

Tidak diragukan lagi bahwa Indonesia yang berada di garis katulistiwa memiliki sumber kekayaan alam yang beragam dan melimpah. Pada konteks pemanfaatan untuk pariwisata, kekayaan alam nasional dapat dijelaskan antara lain:

1. Memiliki kawasan terumbu karang terkaya di dunia dengan lebih dari 18% terumbu karang dunia, serta lebih dari 3.000 spesies ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan yang menciptakan 600 titik selam.
2. Terdapat 50 taman nasional di Indonesia, enam di antaranya termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO.
3. Memiliki lebih dari 400 gunung berapi dan 130 di antaranya termasuk gunung berapi aktif.
4. Memiliki panjang garis pantai Indonesia sekitar 99.093 km

Sumber Kekayaan Alam (SKA) mempunyai dua fungsi utama, yaitu: sebagai modal pembangunan ekonomi dan penyangga kehidupan. Dalam pemanfaatannya pada kegiatan pariwisata, SKA dapat dijadikan modal pembangunan kepariwisataan serta pengelolaannya yang bersifat berkelanjutan.

e. Gatra Ideologi

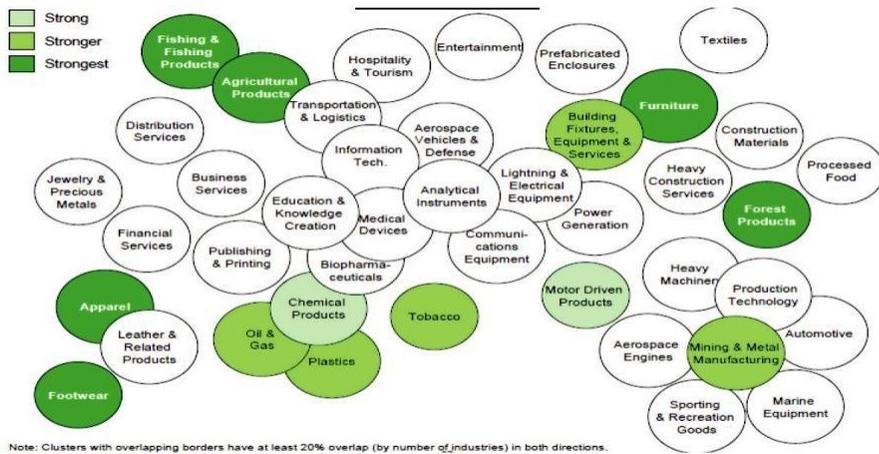
Berdasarkan Tannas Lemhanas RI, 2016, menunjukkan bahwa gatra ideologi berada pada posisi yang kurang tangguh dengan skor 2,06 di mana untuk menjadi cukup tangguh dibutuhkan skor 2,60. Meskipun secara ideologi, umumnya masyarakat Indonesia masih menyatakan Pancasila sebagai dasar negara, namun skor tersebut menunjukkan nilai yang harus diangkat. Pendidikan merupakan senjata utama yang dapat digunakan dalam meningkatkan ideologi bangsa dari sejak usia dini.

f. Gatra Politik

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu program utama pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla yang dituangkan dalam program NAWACITA. Produktivitas rakyat serta daya saing global merupakan unsur-unsur yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Havard Business School (Porter 2009) terkait dengan daya saing produk Indonesia menunjukkan, produk Indonesia memiliki daya saing kuat pada tingkat global produk perikanan, pertanian, furnitur, kehutanan, *apparel*, dan *footwear*.

Sementara produk yang masih memiliki daya saing untuk diekspor adalah produk plastik, minyak dan gas, logam, pertambangan batubara, tembakau, perlengkapan, peralatan, dan jasa bangunan. Sedangkan produk lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan agar memiliki daya saing di pasar global, sebagaimana terangkum dalam gambar berikut:



Sumber: Porter, Michael E. 2009.

Penelitian ini dilakukan pada 2009, sehingga sangat memungkinkan perubahan-perubahan terhadap daya saing produk Indonesia yang terjadi pada kurun delapan tahun.

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar bagi

setiap manusia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan mempengaruhi fertilitas masyarakat.

Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara.

g. Gatra Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu program utama pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla yang dituangkan dalam program NAWACITA. Produktivitas rakyat serta daya saing global merupakan unsur-unsur yang menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi.

h. Gatra Politik

Meskipun pendidikan vokasi pariwisata memiliki peran yang minim pada peningkatan ketangguhan gatra politik (2,43 dari 2,60; Tannas Lemhanas, 2016), namun pariwisata memiliki peran dalam meningkatkan gatra politik nasional. Hal ini dikarenakan kekayaan budaya bangsa Indonesia menarik karena memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal dapat dikembangkan dan dikenalkan kepada bangsa-bangsa di dunia melalui aktivitas pariwisata akan dapat menjadi perekat bangsa.

i. Gatra Sosial dan Budaya

Dari data Tannas Lemhanas RI, 2016, gatra sosial budaya menunjukkan skor 2.14 yang berarti pada posisi kurang tangguh. Ketidaktangguhan ini dapat disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta agama yang dianut. Berdasarkan sensus BPS 2010 di Indonesia, terdapat 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa.

Sementara untuk agama, terdapat enam agama yang diakui eksistensinya oleh negara. Isu-isu sosial dan agama baik secara nasional,

regional, maupun internasional akan memberikan secara langsung terhadap gatra sosial budaya.

Guna meminimalisir hal tersebut, pendidikan merupakan benteng terdepan dalam memberikan pengetahuan terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia. Pendidikan vokasi bidang pariwisata pada umumnya mengajarkan tentang sosial budaya manusia baik di tingkat nasional maupun pada tingkat global dikarenakan kedekatannya dengan pelayanan kepada wisatawan. Pemahaman lintas budaya ini, diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan pada gatra sosial budaya.

j. Kondisi Pertahanan dan Keamanan

Indonesia berada pada posisi strategis global yaitu pada silang dunia, dengan kekayaan alam yang menjadi sasaran dan tujuan negara-negara lain. Hubungan kepariwisataan pada gatra pertahanan dan keamanan sangat essential, terutama adalah faktor keamanan. Dalam banyak penelitian kepariwisataan, faktor keamanan merupakan hal penting dalam mendatangkan wisatawan selain faktor daya tarik wisata. Sehingga penciptaan keamanan nasional akan mampu berfungsi sebagai “*push factor*” kepariwisataan nasional.

BAB IV

TINJAUAN PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PARIWISATA BERBASIS *PENTA HELIX* SAAT INI

1. Pandangan Umum

Dalam Undang-undang pendidikan tinggi, jenis pendidikan dapat disebutkan sebagai pendidikan berbasis akademik dan pendidikan berbasis vokasi. Pendidikan vokasi didefinisikan sebagai pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan¹⁶.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk kepentingan praktis dimulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan yang berfungsi mengembangkan peserta didik agar memiliki pekerjaan keahlian terapan tertentu melalui program vokasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mengarahkan mahasiswa untuk mengembangkan keahlian terapan, beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu, dan dapat menciptakan peluang kerja.

Penguatan pendidikan vokasi dimaksudkan agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya terfokus pada jenis pendidikan akademik yang diarahkan untuk menjadi ilmuwan (*scientist*) yang tempat bekerjanya sangat terbatas, melainkan masyarakat diberikan peluang yang seluas-luasnya untuk memanfaatkan pendidikan vokasi yang diarahkan untuk memperoleh keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Harapan pada pendidikan vokasi untuk membantu peserta didik dalam mengenali dirinya sesuai dengan tahapan yang diharapkan tentu sangat besar. Sehingga dalam pendidikan kejuruan, proses latihan yang diarahkan untuk menumbuhkan pengalaman, rangsangan visual, kesadaran afektif, penggalian informasi kognitif, dan pengembangan keterampilan psikomotorik menjadi keharusan dan hal yang niscaya.

Proses latihan yang berkesinambungan bertujuan untuk menunjang pengembangan vokasional yang meliputi penajakan, pemantapan, dan pelestrarian bakat seorang peserta didik dalam meniti karier di dunia kerja. Oleh karena itu lulusan pendidikan vokasi lebih mementingkan kemampuan praktis dari pada teoritis, kemampuan itu dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikat kompetensi oleh setiap lulusan pendidikan vokasi.

2. Kondisi Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix*

a. Manajemen Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata yang Belum Optimal

Masyarakat ekonomi ASEAN telah diberlakukan sejak 2015, yang mana pemberlakuan MEA dapat pula dimaknai sebagai harapan akan prospek dan peluang bagi kerja sama ekonomi antarkawasan dalam skala yang lebih luas, melalui integrasi ekonomi regional kawasan Asia Tenggara, yang ditandai dengan terjadinya arus bebas (*free flow*): barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan modal.

Pemberlakuan MEA pada akhir 2015 akan dapat menjadi pecundang apabila hanya menjadi pasar impor dan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) ini bakal terjadi jika tanpa persiapan yang matang dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

Dalam konteks pembangunan pendidikan, tidak ada alasan lagi bagi lembaga pendidikan di Indoensia untuk tidak merespon keperluan tenaga terampil yang diperlukan dunia usaha dan dunia industri di tingkat ASEAN.

Di berbagai pameran bursa kerja, seringkali ribuan tenaga kerja memenuhi pameran tersebut yang mana fenomena ini mengindikasikan tidak tersambungunya dunia pendidikan dengan kepentingan dunia kerja di daerah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja saat ini dipenuhi oleh tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sesuai kebutuhan industri atau dunia kerja. Sehingga saat ini fenomena yang terjadi adalah bahwa lowongan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tujuan utama lulusan yang berbasis akademik, dikarenakan angkatan kerja yang bergelar sarjana dan mendapat pendidikan yang setengah-setengah itu akan muncul potensi eksploitasi ledakan yang luar biasa terhadap ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi kinerjanya rendah.

Pada saat ini, masih banyaknya ekspektasi putra-putri bangsa Indonesia yang menilai gelar sebagai aspek *prestige* dalam pendidikan sehingga tidak dibekali skill kerja. Sehingga Strata Satu (S1) menjadi pilihan lulusan sekolah menengah dan sekolah vokasi (diploma) masih dipandang sebelah mata.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi saat ini menjadi peluang besar dalam pengembangan pendidikan vokasi, hal ini ditandai dengan peluncuran pendidikan vokasi tahap III yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian¹⁷.

Hal ini dapat menjadi peluang dalam menyelesaikan tekanan tenaga kerja yang menjadi *ouput* dunia pendidikan agar bisa memenuhi kualifikasi dunia kerja.

Pendidikan vokasi merupakan jenis pendidikan yang memprioritaskan kemampuan individu (*skill*) sebagai hasil akhir dari pelaksanaan pendidikan. Pariwisata yang juga disebut merupakan salah satu ekonomi yang mengandalkan SDM sebagai alat produksi utama, khususnya pada aspek pelayanan.

Hal ini dapat terlihat pada dukungan unsur legislatif dalam pengembangan pendidikan vokasi bidang pariwisata, di mana pernyataan anggota DPR, Saleh Partaonan Daulay, yang mendukung

program pendidikan vokasional yang digalakkan pemerintah dengan sasaran program diprioritaskan di daerah-daerah tujuan wisata¹⁸.

Secara nasional, terdapat 82 PTN dengan 3051 program studi; dan 2561 PTS dengan 10287 program studi, ternyata sangat sedikit program studi yang bermutu, dalam arti mampu mencetak lulusan yang berkualifikasi dan mampu menjadi pionir di bidangnya. Ini dapat terlihat beberapa kasus yang banyak diberitakan, antara lain meliputi:

- 1) Pada 2015, terdapat 243 perguruan tinggi yang di non aktifkan.
- 2) Pada 2016,¹⁹ berdasarkan Kemenristekdikti diberitakan bahwa sebanyak 13 perguruan tinggi kembali ditutup.
- 3) Pada 2017, berdasarkan kemenristekdikti diinformasikan bahwa lulusan 243 perguruan tinggi yang di nonaktifkan ini dilarang mengikuti tes CPNS tahun 2017.

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Perundangan dan Peraturan Pemerintah yang merupakan kesatuan tujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi, antara lain UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP, RPP tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan HELTS (*Higher Education Long Strategy*) 2003-2010. Ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyatakan bahwa: (1) Setiap Satuan Pendidikan formal dan nonformal wajib melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan, (2) Penjaminan Mutu pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, (3) Penjaminan Mutu pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menunjukkan keseriusan dalam pengelolaan pendidikan. Namun dengan kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya, membuktikan bahwa perguruan tinggi telah mengabaikan tugas utamanya sebagai institusi yang

mengajarkan kebenaran, menemukan kebenaran, dan membangun nilai-nilai baru.

Apabila mengkaji dari pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, berdasarkan data HILDIKTIPARI, 2017, dari 231 Program Studi pada 130 pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata hanya 46 prodi yang terakreditasi A dan 139 terakreditasi B dan sisanya terakreditasi C. Sementara itu dari 130 perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata tersebut hanya 17 yang terakreditasi dengan predikat 1 terakreditasi A dan 3 terakreditasi B dan sisanya terakreditasi C. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan manajemen pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan.

Manajemen pendidikan merupakan hal yang sangat krusial untuk diatur dengan jelas agar konsep pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dapat tepat sasaran dan berhasil. Salah satu yang membuat kacaunya pengelolaan pendidikan vokasi bidang pariwisata di Indonesia adalah karena tatanan kelembagaan yang tambal sulam dan tidak adanya kesepakatan antarlembaga terkait demi mencapai tujuan akhir.

b. Kebijakan serta Regulasi dalam Pengelolaan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Belum Dilakukan Secara Terintegrasi

Pendidikan vokasi mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada 10 Agustus 2012. Dengan disahkan Undang-Undang nomor: 12 Tahun 2012 yang memuat tentang berbagai ketentuan baru mengenai pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi, pembukaan program studi baru, serta mengamanatkan penguatan pendidikan vokasi yang dapat dimaknai bahwa khusus untuk pendidikan vokasi masih terbuka untuk pendirian maupun pembukaan program studi baru.

Implementasi terhadap Undang-Undang no 12 tahun 2012 ditindak lanjuti oleh penandatanganan MoU di lima kementerian, yaitu, Kementerian Perindustrian; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara. MoU ini mencanangkan konsep *link and match* antara pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Menteri Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani pernah mengatakan, prioritas revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di antaranya adalah industri, kemaritiman, pariwisata, dan pertanian²⁰.

Kemenristekdikti juga mencanangkan program revitalisasi pendidikan vokasi dalam menjawab tantangan persaingan global khususnya pada era MEA.

Abdul Madjid dalam tulisannya, “Pendidikan Tanpa Planning” (Kedaulatan Rakyat, 2006), menyatakan, rendahnya mutu pendidikan kita disebabkan oleh belum komprehensifnya pendekatan perencanaan yang digunakan. Perencanaan pendidikan hanya dijadikan faktor pelengkap atau dokumen “tanpa makna” sehingga sering terjadi tujuan yang ditetapkan tidak tercapai secara optimal.

Hal ini ditegaskan oleh H. Noeng Muhadjir (2003:89), bahwa “pembuatan implementasi kebijakan berupa perencanaan, mungkin saja dilakukan oleh para eksekutif tanpa penelitian lebih dahulu. Kemungkinan resikonya beragam, misalnya membuat kesalahan yang sama dengan eksekutif terdahulu, tidak realistis, tidak menjawab masalah yang dihadapi masyarakat, sampai kedugaan manipulatif-koruptif”.

Permintaan pasar terhadap tenaga kerja lulusan vokasi atau diploma tampaknya perlu diperbanyak. Karena secara *life skill*, lulusan vokasi bisa dibilang lebih unggul daripada lulusan sarjana karena dibekali pelatihan dan praktik yang lebih ketika menempuh studi daripada lulusan sarjana.

Secara asumsi, yang dibutuhkan Indonesia untuk memajukan perekonomian adalah keseimbangan lapangan pekerjaan yang sesuai antara

lulusan sarjana dan vokasi, sehingga tidak ada istilah penempatan sebuah posisi pekerjaan yang berakibat serius bagi kelangsungan suatu proyek.

Asumsi ini juga dapat menjadi sebuah solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia. Guna memenuhi hal tersebut di atas serta sejalan dengan penerapan otonomi daerah, lembaga-lembaga pendidikan khususnya pendidikan tinggi perlu bekerjasama dengan industri dan pemerintah daerah.

Terjadinya kolaborasi kaki tiga (tripartit) antara pendidikan vokasi, pemerintah daerah, dan dunia industri diharapkan akan mampu menciptakan SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri yang tentunya akan berdampak pada keberlanjutan (*sustainability*) dunia pendidikan yang dapat terjaga secara baik.

Dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan, paling tidak ada beberapa pihak yang mutlak harus berkolaborasi dan memiliki komitmen penuh untuk terlibat. Mereka adalah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pariwisata, Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja, asosiasi-asosiasi profesi, perusahaan swasta dan instansi pemerintah (sebagai pengguna *output*), serta lembaga pendidikan kejuruan (formal dan nonformal).

Akan sangat komprehensif pelaksanaannya bila lembaga terkait seperti Bappenas dan Bappeda, Kementerian dan Dinas Perindustrian, serta gubernur/ bupati/ wali kota dapat memiliki keterlibatan aktif karena berhubungan dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi nasional serta daerah.

Tatanan kelembagaan dalam menjalankan skema nasional pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata ini harus diberi payung hukum yang sangat kuat karena melibatkan banyak pihak. Tanpa adanya payung hukum setingkat UU, sangat sulit bagi lembaga pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata untuk dapat memajukan dirinya dan berkontribusi bagi ekonomi bangsa.

Kebijakan yang ada saat ini terkait dengan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata masih mengacu kepada:

- 1) UU No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas,
- 2) UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- 3) UU No. 9 Tahun 2009 tentang BHP, RPP tentang Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- 4) Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- 5) PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan HELTS (*Higher Education Long Strategy*) 2003-2010,
- 6) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Hal-hal yang mutlak harus diatur dalam Undang-undang pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata adalah menyangkut peran, hak dan tanggung jawab setiap pihak, proses perencanaan, penyelenggaraan, hingga evaluasi, dan akreditasi.

Harus juga diatur yang jelas mengenai kewajiban pihak-pihak terkait untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran berbasis dunia kerja, penyaluran kegiatan praktek dan lulusan, dan lain-lain. Tidak lupa harus diatur juga mengenai *reward* dan *punishment* jika ada pihak yang sangat besar kontribusinya atau pun melanggar aturan. Dengan demikian maka perusahaan akan memiliki kewajiban ikut menerima dan melatih peserta didik kejuruan, jika tidak maka ada sanksinya.

Pendidikan tinggi dianggap bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* berupa kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*profesional needs*).

c. Pengembangan Kurikulum Vokasi Bidang Pariwisata Belum Mampu Merespon Kebutuhan Industri Pariwisata.

Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti, Dr Ir Paristiyanti Nurwardani, M.P, 2017²¹ menyatakan bahwa pemerintah akan mendesain ulang

kurikulum untuk pendidikan vokasi dengan melibatkan dunia industri untuk menjamin relevansi hasil lulusan dengan kebutuhan industri.

Revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan dengan penyempurnaan capaian kurikulum 3+2+1 yang akan memuat pendidikan karakter dan kepemimpinan serta mendorong penguasaan bahasa asing yang lebih baik agar lulusan vokasi lebih banyak terserap di dunia kerja.

Nurwardani menyatakan, kondisi sekarang lulusan vokasi lebih banyak menganggur dibanding lulusan akademik. Berdasarkan data BPS 2017, saat ini kondisi tingkat pengangguran nasional dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5: Komposisi Pengangguran Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan 2013-2014

Tingkat	2013	2014	2015	2016
Tidak Pernah Sekolah	112,435	134,040	124,303	94,293
Tidak/Belum Tamat SD	523,400	610,574	603,194	557,418
SD	1,421,873	1,374,822	1,320,392	1,218,954
SLTP	1,874,799	1,893,509	1,762,411	1,546,699
SLTA UMUM/SMU	864,649	847,365	1,174,366	1,384,327
Akademi/Diploma	197,270	195,258	254,312	249,363
Universitas	425,042	398,298	565,402	695,304
Total	7,240,897	7,147,069	7,454,767	7,024,172

Sumber :BPS, 2017

Pembelajaran berbasis kompetensi akan menuntun proses pembelajaran yang berorientasi kepada kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Pendekatan yang digunakan adalah belajar sambil bekerja (*learning by doing*), *competence base training*, dan *individualized learning*. Dengan berubahnya karakteristik dunia kerja yang menuntut keterampilan intelektual, selain keahlian kejuruan, pembelajaran pada pendidikan kejuruan perlu menerapkan prinsip pendekatan konstruktivisme.

Pendidikan tinggi dianggap bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan

misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* berupa kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*profesional needs*).

d. Penerapan Standarisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata Belum Mengacu Kepada Standarisasi Global.

Sebagai konsekuensi dari tuntutan pasar global, maka institusi pendidikan kepariwisataan dituntut tidak hanya menghasilkan keterampilan akademis yang secara tradisional dihasilkan dari mata kuliah pada program studi dan gelar yang dicapai, melainkan harus berbasis pada *capabilities* dan lebih eksplisit berusaha mengembangkan apa yang disebut sebagai *'key', 'core', 'transferable' and/or 'generic' skills* yang dibutuhkan oleh berbagai bidang dan tingkat pekerjaan²².

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Berpedoman kepada kebijakan pemerintah UU No 20 Tahun 2003, maka sesungguhnya reputasi suatu lembaga pendidikan tergantung kepada kualitas dan ruang lingkup akademis yang dilakukan. Oleh karena pendidikan vokasi mengajarkan keahlian terapan, maka lebih jauh, tingkat keberhasilan suatu lembaga pendidikan tidak hanya ditentukan oleh tingkat profesionalisme yang dipunyai lulusannya, tetapi juga oleh kesempatan terbuka bagi lulusannya untuk mendapatkan tempat kerja yang sesuai di pasar kerja (*labor market*).

Pasar kerja tidak hanya bersifat nasional, namun juga harus *forward looking* terhadap kebutuhan pasar kerja global. Penerapan kebutuhan pasar kerja global menuntut pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata menyesuaikan kepada standar-standar pendidikan vokasi secara internasional.

Pada kenyataannya, banyak lembaga pendidikan yang belum mampu menghasilkan lulusan yang berkualifikasi kebutuhan pasar kerja nasional apalagi memenuhi pasar kerja internasional. Dari berbagai pengamatan dan

pengalaman penulis dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain:

- 1) Keterbatasan tenaga ahli profesional bidang kepariwisataan dalam memberikan transfer pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang *up to date* yang digunakan oleh industri kepariwisataan.
- 3) Rendahnya proses magang bagi tenaga pendidik pada industri-industri kepariwisataan yang berskala internasional.
- 4) Proses transfer ilmu yang dilakukan oleh tenaga pendidik hanya bersifat teori, dikarenakan keterbatasan tersebut diatas.

e. Analisis Implikasi Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix* Terhadap Peningkatan Daya Saing serta Peningkatan Daya Saing Terhadap Ketahanan Nasional

1. Implikasi Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix* Terhadap Peningkatan Daya Saing

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dijelaskan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk aktif mengembangkan dirinya sendiri; yang aktif adalah peserta didik, sedangkan pendidik menyediakan kesempatan atau kondisi optimal bagi terjadinya belajar dan proses pembelajaran.

Pendidikan tinggi dianggap bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* berupa kebutuhan masyarakat (*societal needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*profesional needs*).

Tersedianya SDM yang menguasai iptek dalam jumlah, mutu, dan memiliki daya beli yang memadai hasil dari lembaga-lembaga pendidikan akan mendorong tumbuhnya lembaga, dunia, dan industri berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menyerap tenaga kerja produktif, yang dapat menghasilkan barang, jasa, dan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

Asumsinya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada di suatu negara. Artinya, jika suatu negara memiliki sistem pendidikan yang baik, maka sistem itu akan mampu melahirkan tenaga kerja yang baik.

Ditjen Dikti Depdiknas telah menyusun Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP IV 2003-2010) yang selanjutnya disempurnakan menjadi HELTS (*Higher Education Long Term Strategy*).

Adapun isi dari HELTS ini adalah berupa suatu rencana strategis pengembangan jangka panjang yang bertujuan menempatkan sistem pendidikan tinggi nasional, dengan segala keterbatasan yang ada pada kedudukan paling baik di masa depan agar mampu menanggapi tantangan yang dihadapi secara efektif.

HELTS merumuskan tiga strategi utama pengembangan pendidikan tinggi, yaitu daya saing bangsa (*nation's competitiveness*), otonomi dan desentralisasi (*autonomy*), dan kesehatan organisasi (*organizational health*).

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendidikan vokasi merupakan salah satu bentuk pendidikan yang sekarang menjadi perhatian atau fokus bagi pemerintah. Sebab, pendidikan vokasi mempunyai misi memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional, mandiri, dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung proses industrialisasi. Secara lebih rinci pendidikan vokasi diharapkan mampu.

- 1) Menciptakan lulusan agar siap memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
- 2) Menyiapkan lulusan yang mampu memilih karier, mampu berkompetensi, dan mengembangkan diri.

- 3) Menciptakan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang.
- 4) Menciptakan lulusan yang dapat menjadi sumber daya negara yang produktif dan berdaya saing.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *Grand Recruitment* di STP Bandung bahwa terjadi *gap* antara kebutuhan tenaga vokasi bidang pariwisata dengan lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 7: Tabel Jumlah Lulusan dan Lowongan yang Tersedia pada Kegiatan *Grand Recruitment* 2011-2017

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lulusan	1.861	2.774	4.673	3.800	4.087	3.360	2.897
Kebutuhan	3.329	6.684	9.776	1.136	12.120	10.120	15.409

Sumber : STP Bandung, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa lulusan yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi bidang pariwisata belum dapat memenuhi kebutuhan SDM pada industri kepariwisataan.

Hal ini menunjukkan pula pengangguran sebesar 7,02% (tabel 1.1.). Sebenarnya dapat ditanggulangi dengan SDM yang memenuhi kualifikasi. Dari data-data tersebut, dapat diasumsikan bahwa lulusan pendidikan di Indonesia belum secara merata dapat memenuhi kualifikasi dunia kerja pada tingkat nasional. Bila kondisi ini tidak dibenahi secara terintegrasi dapat meningkatkan *gap* antara kualifikasi lulusan pendidikan tinggi vokasi dan kualifikasi kebutuhan industri pariwisata.

Jaringan Nasional Duta Joko Widodo yang merupakan koordinator perwakilan dari 22 provinsi di Indonesia memberikan delapan rekomendasi kepada pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai bentuk implementasi Nawacita. Dari delapan rekomendasi, yang pertama adalah dalam konteks pendidikan yaitu merekomendasikan untuk segera mendesain ulang pendidikan vokasi.

Peringkat daya saing (*global competitiveness index*) yang dirilis WEF belum lama ini memperlihatkan posisi Indonesia yang menurun. Pada periode 2015-2016, posisi Indonesia masih berada di peringkat ke-37 dari 138 negara, namun untuk periode 2016-2017 turun ke urutan ke-41. Posisi Indonesia berada di bawah negara-negara serumpun seperti Singapura (2), Malaysia (18), dan Thailand (32). Kondisi seperti ini bahkan sudah berlangsung sejak lama.

Apabila mengacu pada peluang di MEA, dapat dikatakan posisi Indonesia dengan pangsa pasar (40,5%) dan share PDB terbesar di kawasan ASEAN, serta satu-satunya yang masuk G20, dengan peringkat 16 PDB dunia, Indonesia memiliki banyak peluang dan kesempatan untuk bersaing di MEA.

Indonesia juga didukung beberapa faktor, yaitu bonus demografi, reformasi struktural, revitalisasi industri, dan peningkatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat. Indonesia diperkirakan akan menikmati bonus demografi pada 2020-2030. Populasi kelas menengah juga tumbuh mencapai 147% pada 2012-2020.

Sedangkan negara gagal, digambarkan oleh Rotberg bila (1) sangat sukar mencapai targetnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk, (2) umumnya terdapat *non-state actors* yang berpengaruh dan membantu memenuhi kebutuhan hidup penduduk, (3) keamanan nyaris menjadi hal yang langka kecuali di kota-kota besar, (4) ekonomi tidak berjalan, (5) kualitas kesehatan memburuk dan sistem pendidikan terabaikan, serta (6) korupsi semakin marak, dan diperparah dengan (7) inflasi.

Berdasarkan WEF 2017, yang melansir laporan *Global Human Capital Report 2017*, kondisi SDM Indonesia saat ini berada di posisi tengah-tengah (65 dari 130 negara) pada persaingan global, kondisi ini menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM nasional. Karena kondisi SDM tersebut akan memberikan dampak penting kepada pemerintah, institusi pendidikan, dan pelaku bisnis dalam melakukan pengembangan dan investasi pada tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rapat kabinet, September 2016, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus memiliki citra positif agar dapat meningkatkan daya saing di pentas global. Ditegaskan pula bahwa citra

positif yang akan menjadi *national branding* menjadi strategi Indonesia untuk meningkatkan daya saing negara, baik di bidang investasi, perdagangan, dan pariwisata.

Dari keseluruhan penjelasan pada sub bab ini, dapat terlihat bahwa pendidikan vokasi pada bidang pariwisata akan memberikan implikasi terhadap daya saing bangsa serta produktivitas bangsa.

2. Implikasi Peningkatan Daya Saing Terhadap Ketahanan Nasional

Daya saing suatu negara dapat dianggap sebagai salah satu sumber dari ketahanan suatu negara dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang dalam membangun peradaban bangsanya (Tylor, 1887).

Peradaban bangsa dapat dibangun melalui kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang unggul. Daya saing yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang akan dapat membangun daya saing politik dan budaya, karena pembangunan peradaban tidak dapat dibangun tanpa kekuatan ekonomi.

Dengan demikian, daya saing merupakan hal yang sangat penting dalam membangun keberlanjutan ekonomi yang diikuti secara langsung oleh keberlanjutan peradaban suatu bangsa.

Sebagai upaya meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan seluruh potensi sektor prioritas domestik, sektor jasa keuangan harus menjadi katalisator yang signifikan dan motor penggerak perekonomian di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian global. Adapun pengembangan sektor prioritas meliputi pertanian, perikanan, dan kelautan, energi, industri, serta pariwisata.

Melalui Inpres no. 6 tahun 2014, pemerintah terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam Inpres ini Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk

meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang dimulai pada 2015.

Dalam peningkatan daya saing nasional terdapat sepuluh sektor pengembangan lain, yang meliputi: pengembangan infrastruktur; pengembangan sistem logistik nasional; pengembangan perbankan; investasi; usaha mikro, kecil, dan menengah; tenaga kerja; kesehatan; perdagangan; kepariwisataan; dan kewirausahaan.

Ketahanan Nasional (Tannas) adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta untuk mencapai perjuangan nasionalnya (Suradinata, 2005: 47, atau Soemarsono dkk, 2001: 106).

Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat terbentuk oleh tingkat ekonomi masyarakat yang dapat tercapai berkat tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya saing nasional yang berujung kepada pembentukan ketahanan nasional yang kuat.

Dalam penguatan ketahanan nasional, Iptek merupakan faktor yang sangat penting selain SDM sebagai ujung tombak perubahan.

Beberapa keuntungan yang akan terjadi sebagai *trickle down effect* ketahanan nasional berdasarkan hasil kerja forum FRI 2007 adalah:

- 1) Terjadi *kohesif* antara wirausahawan dengan bisnis tradisional dalam proses penumbuhan daya saing.
- 2) Pemahaman yang lebih dalam arti persatuan dan kesatuan untuk menumbuhkan daya saing nasional.
- 3) Mendorong pertumbuhan daya saing dari berbagai aspek secara sinergis.

- 4) Peningkatan keterlibatan semua elemen bangsa dalam membangun ketahanan nasional.
- 5) Perubahan cara pandang menghadapi persaingan global.

Dari penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa daya saing bangsa yang meliputi aspek ekonomi, politik, dan budaya akan mampu menciptakan kondisi yang dinamis bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan, hambatan, gangguan, dan persaingan dengan negara-negara lain di dunia.

BAB V

KONDISI PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PARIWISATA YANG DIHARAPKAN

1. Pandangan Umum

Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi memiliki tantangan dalam menjembatani masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Indonesia. Berdasarkan data di bawah ini, tantangan pendidikan di Indonesia yang masih tingginya tamatan / tidak tamat SD masyarakat Indonesia.

Tabel 7: Latar Belakang Pendidikan Masyarakat Indonesia

Pendidikan	2001	2006	2010
SD/tidak tamat SD	63.0%	55.5%	51.5%
SMP	17.7%	20.2%	18.9%
SMA	10.3%	12.7%	14.6%
SMK	5.5%	6.2%	7.8%
Diploma I,II,III	1.6%	2.2%	2.7%
Universitas	1.8%	3.2%	4.6%

Sumber : Direktorat Pendidikan Tinggi, 2011

Apabila dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, masyarakat berpendidikan dasar (70,40%) masih mendominasi komposisi masyarakat kita, sementara Malaysia berlatar pendidikan menengah sebesar 56.30%. Hal ini tampak pada gambar perbandingan latar belakang pendidikan berikut:



Data yang disampaikan pada 2011 ini memberikan indikasi kualitas pendidikan nasional kita masih tertinggal saat itu. Namun tentunya dengan meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pengelolaan pendidikan di Indonesia (alokasi 20% APBN), diharapkan mampu mendongkrak klasifikasi pendidikan masyarakat Indonesia. Penetapan UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan nasional memiliki semangat antara lain:

- a. Perluasan dan jaminan akses
- b. Pengembangan tridharma secara utuh
- c. Kesetaraan
- d. Penguatan pendidikan vokasi
- e. Keutuhan jenjang pendidikan
- f. Otonomi perguruan tinggi
- g. Sistem penjaminan mutu
- h. Memastikan tanggung jawab negara dan menghindari liberalisasi & komersialisasi perguruan tinggi.

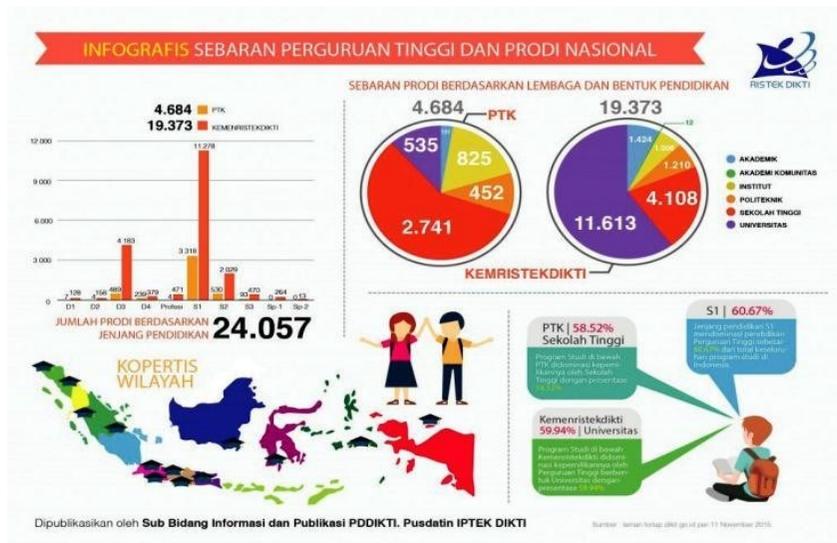
Pendidikan vokasi yang merupakan salah satu dari ruang lingkup dalam Undang-undang no. 12 tahun 2012, merupakan fokus dalam kertas kerja perorangan, hal tersebut dikarenakan tingginya perhatian pemerintah saat ini dalam pengembangan pendidikan vokasi.

2. Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata yang diharapkan

Pendidikan vokasi merupakan pengetahuan terapan yang memiliki fungsi dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang mempunyai nilai keunggulan tersendiri. Sehingga dapat juga dikatakan bahwa mutu pendidikan vokasi dapat dirumuskan sebagai keseluruhan (karakteristik) kemampuan lulusan yang dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Mengapa pendidikan vokasi begitu penting dibahas, antara lain:

- Terjadinya laju perkembangan masyarakat dan dunia kerja yang sangat cepat.
- Meningkatnya persaingan antarnegara dalam konteks global dan regional.
- Relevansi antara tuntutan perkembangan masyarakat dan dunia kerja dalam penyiapan SDM yang bermutu.

Berdasarkan data DIKTI saat ini terdapat 19.373 program studi yang berada di bawah pembinaan Kemenristekdikti dan 6.684 program studi di bawah Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK). PTK saat ini memiliki sekolah tinggi sebanyak 58.52% (2.741 prodi) dan Kemenristekdikti memiliki 59,94% (11,613 prodi) pada tingkat universitas. Hal ini nampak dalam infografis sebaran perguruan tinggi dan prodi nasional berikut ini:



Sumber: Nasir, 2016.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (2015-2019) saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Pendidikan dan Pelatihan Vokasional 2017, menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi ini merupakan salah satu dari tiga pilar utama Kebijakan Ekonomi Pemerataan. Penekanan pada pendidikan dan pelatihan vokasi adalah berangkat dari *demand driven*.

Mobley (Barlow dkk, 1988) dalam Wijanarka, 2012, menyatakan bahwa filosofi pendidikan vokasi (*career and technical / C&T*) yaitu(1), *C& T education must be a part of the total education program;* (2), *C&T education must be available to all people;*(3), *C&T education must be everyone's concern;*(4), *Professionalization of C&T must continue,* dan (5) *Student organizations must be considered part of the total C&T program.*

Sementara itu Camp dan Johnson, 2005: 37, dalam Wijanarka, 2012;3 mengemukakan bahwa pendidikan vokasi adalah (1) *Vocational education will be efficient in proportion as the environment in which the learner is trained is replica of the environment in which he must subsequently work,* dan(2) *Effective vocational training can only be given where the training jobs are carried on in the same way, with the same operations, the same tools, and the same machines as in the occupation it self.*

Apabila mengacu kepada pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat diasumsikan bahwa pendidikan vokasi harus dikelola secara sungguh-sungguh agar lulusan (*output*) dan *outcome*-nya sesuai dengan kompetensi kerja yang diminta oleh dunia kerja. Sehingga secara umum karakteristik lulusan pendidikan vokasi yang didasarkan pada level pendidikan dapat dilihat berikut ini:

D1: lulusan bekerja di bawah pengawasan

D2: lulusan bekerja mandiri

D3: lulusan terampil dan mandiri

D4: lulusan dapat melakukan pengawasan

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pendidikan vokasi terdapat beberapa ciri yang membedakannya dengan pendidikan yang bersifat akademis, yaitu *pertama*, program pendidikan mengarah ke profesi. *Kedua*, memiliki tenaga pengajar kompeten. Dosen pada pendidikan berbasis vokasi harus memiliki sertifikat tenaga pendidik dan sertifikat kompeten. *Ketiga*, peserta didik memiliki potensi untuk dikembangkan. *Keempat*, peralatan dan fasilitas memadai. *Kelima*, keterjaminan biaya operasional. *Keenam*, sistem pengelolaan yang menjamin kesinambungan sumber daya berkelanjutan.

Agar pembelajaran vokasi dapat menciptakan tenaga lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri, proses pembelajaran pendidikan vokasi melalui beberapa tahap, seperti:

- a. Tahap 1: Pengalihan/*transfer of knowledge*
- b. Tahap 2: Pencernaan/*digestion of knowledge*, dalam hal ini mahasiswa berlatih suatu yang sudah diajarkan.
- c. Tahap 3: Pembuktian ilmu/*validation of knowledge*, pada tahap ini mahasiswa diuji dengan kasus-kasus.
- d. Tahap 4: Pengembangan keterampilan/*skills development*, tahap ini merupakan yang paling penting untuk pendidikan vokasi karena pada proses ini secara tidak sadar mahasiswa kompeten.

Dalam pengembangan pendidikan vokasi berdasarkan ILO 2012 menyatakan bahwa: *“it is no longer sufficient to train workers to meet their specific current needs; we should ensure access to training programs that support life long skills development and focus on future market needs”*.

Dari pernyataan tersebut dalam pendidikan vokasi dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan pelatihan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja. Oleh karena itu karakteristik lulusan pendidikan vokasi bisa bertahan pada era global yang selalu berubah adalah memiliki keterampilan pada bidangnya yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi pengetahuan serta ketrampilan, serta memiliki keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kualifikasi, yaitu keterampilan-keterampilan dasar, keterampilan sosial seperti bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi, keterampilan berpikir antara lain kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan memecahkan masalah; dan keterampilan personal antara lain adalah kemampuan mandiri dan integritas.

Bidang pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang membutuhkan SDM yang berkompeten dalam produksi, mengenali perubahan tren produk, serta kebutuhan pasar yang sangat dinamis. Dalam hal ini sangat penting bahwa pola pendidikan vokasi bidang pariwisata harus selalu mengalami penyesuaian terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Dalam menjadikan pendidikan vokasi bidang pariwisata sebagai upaya peningkatan daya saing, maka beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman meliputi:

a. *The Student*

Pemahaman *the student* adalah siswa/peserta didik di mana pendidikan vokasi bidang pariwisata ini diimplementasikan dan merupakan indikator keberhasilan dari sebuah lembaga pendidikan. Dalam menghadapi dunia persaingan yang semakin kompetitif ini, SDM dituntut untuk memiliki *hard skill* dan *soft skill* secara terintegrasi untuk mampu berpikir, bersikap, dan berbuat secara kreatif dalam situasi yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sukanto, 2001, memberikan sebuah tulisan terkait dengan pendidikan vokasi menuju era globalisasi yang meliputi, antara lain:

1. Pembelajaran kearah kontekstual, *work-based learning*, pelatihan siap pakai, serta konsep *link and match*. Asumsinya adalah dengan lebih dulu mengidentifikasi perangkat kompetensi lulusan atau konteks aplikasi pengetahuan, atau kebutuhan dunia bisnis dan industri, isi dan poses pendidikan di sekolah atau tempat pelatihan lebih berpeluang untuk mencapai tujuan yang dirumuskan.
2. Gerakan ke arah sebaliknya dengan mendesain komponen kurikulum yang membekali kemampuan dasar yang diperluas (*broad-based curriculum*), menambah komponen kurikulum adaptif yang diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas lulusan, atau bahkan di beberapa negara ada trend ke arah kurikulum yang terintegrasi dan mengarah kepada penyatuan kembali jalur akademik dan vokasional.

Berdasarkan TEDQUAL-UNWTO, 2016, tujuan utama dalam konteks peserta didik sebagai penerima pendidikan kompetensi adalah pengetahuan yang menjadikan kebutuhan individu dan situasi pekerjaan setelah mereka lulus.

Tersedianya SDM yang menguasai Iptek, mutu, dan memiliki daya beli yang memadai hasil dari lembaga-lembaga pendidikan akan mendorong tumbuhnya lembaga, dunia, dan industri berbasis ilmu pengetahuan yang dapat menyerap tenaga kerja produktif, yang dapat menghasilkan barang, jasa, dan produk-produk yang berdaya saing tinggi.

Asumsinya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas harus dilihat dari kualitas sistem pendidikan yang ada di suatu negara.

TEDQUAL-UNWTO menjelaskan bagaimana memperlakukan peserta didik yang sesuai dengan standar internasional adalah sebagai berikut:

- 1) Komunikasi dan promosi terhadap informasi program pendidikan. Program pendidikan vokasi bidang pariwisata yang dikembangkan oleh institusi dapat terinformasikan oleh calon peserta didik (sebelum pendaftaran) maupun peserta didik (selama pembelajaran). Dalam hal ini lembaga pendidikan secara berkala mengembangkan sebuah rencana komunikasi kepada calon peserta didik dan peserta didik. Informasi program pendidikan meliputi persyaratan masuk, jenjang pendidikan, program studi, proses administrasi, kalender akademik, biaya selama pendidikan dan spesifikasi keahlian lulusan.
- 2) Pengenalan terhadap program pendidikan vokasi bidang pariwisata. Bahwa program pendidikan dalam membentuk *hard skills* dan *soft skills* dikomunikasikan kepada peserta didik baik sebelum dan selama masa pemberian materi, baik pada bentuk tatap muka maupun praktik. Dalam memberikan komunikasi awal kepada peserta didik dapat dilakukan melalui buku panduan akademik serta sosialisasi terhadap panduan akademik secara berkala.
- 3) Perhatian kepada kebutuhan peserta didik; administrasi akademik, kesejahteraan sosial dan dukungan kurikulum. Kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran

pendidikan vokasi bidang pariwisata meliputi administrasi akademik, kesejahteraan sosial, dukungan kurikulum, maupun evaluasi terhadap performa peserta didik selama melakukan pendidikan. Selain kepada peserta didik, maka perhatian harus juga diberikan kepada alumni/lulusan institusi terkait.

b. *The Employer*

The employer dapat didefinisikan bahwa sebagai *stakeholders* (pemangku kepentingan) baik yang bersifat publik maupun privat yang memiliki fungsi:

1. Penerima/pengguna lulusan. Dalam menciptakan *link and match* maka konteks pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan penerima/pengguna lulusan. Sehingga dalam hal ini institusi pendidikan diharapkan dapat menyesuaikan kurikulum pendidikan vokasi bidang pariwisata sesuai kebutuhan umum penerima/pengguna lulusan.
2. Mempengaruhi terhadap proses pembelajaran. *Stakeholders* dapat juga memiliki fungsi mempengaruhi dalam penyusunan *soft skill* maupun *hard skill*. Oleh karena itu institusi pendidikan diharapkan mampu mengadaptasi terhadap tren maupun kebutuhan khusus terhadap penerima/pengguna lulusan.

c. *The Curriculum & Pedagogic*

Ciri-ciri kurikulum (Muslihudin 2010;133-134) yang dapat mempertimbangkan isu-isu utama yang sedang berkembang di dunia global, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kurikulum yang menjamin terjadinya keseimbangan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi antara negara maju dan berkembang.
2. Kurikulum yang peduli terhadap lingkungan dan ketahanan ekologi.
3. Kurikulum yang mengembangkan semangat pluralisme.
4. Kurikulum yang mengembangkan visi tatanan dunia baru (*new world order*) yang damai dan toleran.

5. Kurikulum yang mengembangkan sensitifitas gender.
6. Kurikulum yang mengembangkan visi masyarakat madani yang demokratis.

Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran yang bersifat konservatif dan rekonstruktif. Maksud konservatif adalah memuat nilai-nilai yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hali ini bertujuan agar ketika mereka kembali pada lingkungan masyarakat, mereka dapat menempatkan diri sesuai nilai dan norma yang baik.

Sementara rekonstruktif berarti penyusunan kembali kurikulum perlu memperhatikan kebutuhan *stakeholders*, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan sisi praktis, yaitu ketrampilan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan global.

Berdasarkan Beane (1986) bahwa kurikulum dalam pendidikan terbagi atas 4 jenis, yaitu: *Pertama*, kurikulum sebagai produk. *Kedua*, kurikulum sebagai program. *Ketiga*, kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, dan *Keempat*, kurikulum sebagai pengalaman belajar bagi siswa.

Kurikulum sebagai program merupakan jawaban atas tuntutan kualitas pendidikan. Oleh sebab itu, sebagai program, kurikulum harus mampu merancang dan mengantisipasi kebutuhan zaman, termasuk di dalamnya kualitas pendidikan dan daya saing.

Kurikulum sebagai hasil belajar yang diinginkan, memiliki makna bahwa kurikulum menjadi arah tercapainya tujuan pembelajaran. Kunci utama dan majunya pembangunan pendidikan di suatu negara dipengaruhi oleh ketepatan kurikulum dalam mengantisipasi masa depan.

Dengan Demikian, standarisasi kurikulum dan standarisasi kompetensi harus mendapat perhatian dan dikuasai oleh seorang lulusan perguruan tinggi.

d. The Management

1. Organisasi. Dalam setiap organisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata, harus dilihat bentuk struktur organisasinya. Struktur organisasi diharapkan dapat mengakomodir lingkup administrasi pendidikan serta tugas dan tanggung jawabnya dalam mendukung proses pembelajaran pendidikan vokasi bidang pariwisata. Struktur organisasi harus dapat terbagi pada urusan penyelenggaraan pendidikan serta penyelenggaraan institusi pendidikan.
2. Penjaminan Mutu. Tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continous improvement*), yang dijalankan oleh perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten sehingga konsumen dan produsen, serta pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

Dalam konteks perguruan tinggi, penjaminan mutu dimaksudkan agar kepuasan dapat dirasakan mahasiswa, orangtua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan.

Pendidikan tinggi dianggap bermutu atau berkualitas apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya, serta mampu memenuhi kebutuhan *stakeholders* berupa kebutuhan masyarakat (*social needs*), kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*), dan kebutuhan profesional (*profesional needs*).

e. *The Faculty*

Konteks *the faculty* yang dikemukakan oleh TEDQUAL-UNWTO lebih menitik beratkan kepada sivitas akademika lembaga pendidikan vokasi termasuk bidang pariwisata yang akan menjadi mediator dalam proses pembelajaran peserta didik.

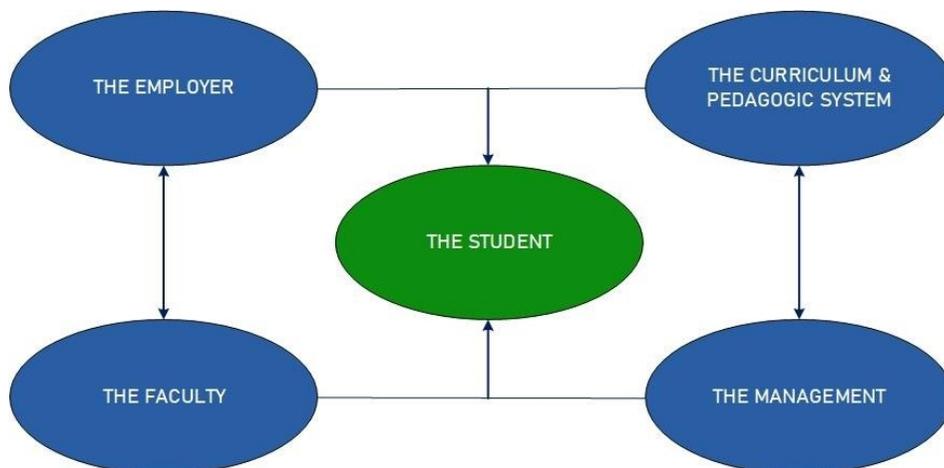
Profesi tenaga pengajar, instruktur dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip (UU RI no. 14 Tahun 2005) sebagai berikut:

- 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme
- 2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
- 3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Dan memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
- 4) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
- 5) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
- 6) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar secara berkelanjutan.
- 7) Memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan.
- 8) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan tenaga pengajar/instruktur/ dosen

Undang-undang Guru dan Dosen (UUGD) merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan, pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UUGD ditentukan bahwa seorang,

- a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat, dan magister yang sesuai dengan tugasnya.
- c. Kompetensi profesi pendidik meliputi:
 - 1) Kompetensi Pedagogik. Kompetensi ini merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
 - 2) Kompetensi Kepribadian. Kompetensi ini merupakan kepribadian pendidik yang mantap, stabil, dewasa, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik.
 - 3) Kompetensi Sosial. Kompetensi ini merupakan kemampuan pendidik berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat.
 - 4) Kompetensi Profesional. Kompetensi merupakan kemampuan pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya untuk membimbing peserta didik memperoleh kompetensi yang ditetapkan.

Secara garis besar pengelolaan pendidikan vokasi pariwisata dapat digambarkan dengan kerja sama antarseluruh lini baik itu kurikulum, manajemen, fakultas, dan *employer* sebagaimana tertera pada gambar berikut:



Sumber: UNWTO, 2016

3. Analisis Kontribusi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta Helix* Terhadap Daya Saing.

a. Kontribusi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis *Penta-Helix* Terhadap Daya Saing

Peningkatan pendidikan vokasi termasuk pariwisata saat ini menjadi salah satu program utama pemerintah dalam meningkatkan daya saing SDM nasional.

Pendidikan vokasi termasuk bidang pariwisata bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap kerja dan bekerja di bidang sesuai dengan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki. Kemampuan serta keterampilan itu didapatkan peserta didik melalui training (pelatihan), teori dan praktik selama mereka belajar di lembaga pendidikan. Perbaikan terhadap mutu proses dan *output* pada sekolah kejuruan diyakini mampu menopang pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang secara tidak langsung juga mempengaruhi ekonomi suatu negara.

Tujuan pendidikan vokasi mencakup empat dimensi utama²³ yaitu: mengembangkan kualitas dasar manusia yang meliputi kualitas daya pikir, daya kolbu, daya fisik; mengembangkan kualitas

instrumental/ kualitas fungsional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga; memperkuat jati diri sebagai bangsa Indonesia dan menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia.

Pendidikan vokasi bertujuan membentuk SDM menjadi tenaga kerja yang memiliki keterampilan serta kemampuan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Sehingga dapat diasumsikan bahwa pendidikan vokasi mempunyai peran penting dalam menunjang kemajuan ekonomi suatu negara termasuk di Indonesia.

Daryanto dan Hafizrianda, (2006), menjelaskan konsep daya saing yang dikembangkan oleh Porter's Diamond, yang membagi kedalam; (1) kondisi faktor, (2) kondisi permintaan, (3) kondisi strategi, (4) kondisi industri pendukung, (5) peran pemerintah. Dalam kondisi faktor, SDM merupakan salah satu keunggulan penciptaan daya saing makro, di mana unsur dari SDM ini meliputi indikator jumlah tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, tingkat upah dan standar jam kerja.

Dalam menciptakan kuantitas dan kualitas tenaga kerja merupakan fungsi utama pendidikan tinggi vokasi. Namun, karena pendidikan vokasi ini merupakan pendidikan yang menghasilkan tenaga yang terampil, maka dibutuhkan peran *stakeholders* dalam mewujudkan tenaga kerja bidang pariwisata yang memiliki kompetensi tinggi.

Harus ada sinergi antara perguruan tinggi, perusahaan dan pemerintah, masyarakat dan media (*penta-helix*) dalam mewujudkan tenaga kerja bidang pariwisata yang berkompeten.

Peran masing-masing dari *penta-helix* dalam pengembangan pendidikan vokasi bidang kepariwisataan ini adalah:

- 1) Institusi pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi.
- 2) Pemerintah sebagai fasilitator antar seluruh *stakeholders* serta menetapkan kebijakan yang mampu mendorong pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- 3) Industri sebagai partner dalam mendukung pembentukan tenaga kerja berkompeten melalui tempat magang,

dukungan kurikulum, serta dukungan sarana dan prasarana maupun penyerapan lulusan industri.

- 4) Masyarakat sebagai penerima manfaat.
- 5) Media sebagai unsur penyebaran informasi tentang kualitas hasil institusi Pendidikan.

Kondisi inilah yang menjadi harapan dari penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata, karena kehadiran tenaga-tenaga profesional bidang pariwisata yang diciptakan oleh lembaga pendidikan vokasi akan dapat berkiprah pada industri pariwisata dalam negeri maupun luar negeri. Hal tersebut berimplikasi secara langsung terhadap daya saing kepariwisataan nasional maupun daya saing SDM manusia Indonesia pada tingkat regional dan global. Dengan tingginya daya saing tersebut secara langsung pula berimplikasi kepada kekuatan ekonomi nasional sebagai salah satu bentuk terciptanya ketahanan nasional.

b. Kontribusi Peningkatan Daya Saing Terhadap Ketahanan Nasional

Pendidikan vokasi memiliki fungsi dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik. Sejak muncul Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan kebijakan tentang pengkategorian sekolah berdasarkan tingkat keterlaksanaan standar nasional pendidikan ke dalam kategori standar, mandiri, dan bertaraf internasional, telah banyak sekolah yang berusaha merespon kebijakan tersebut dan mengimplementasikannya.

Mengacu Standar Nasional Pendidikan maka setiap institusi pendidikan termasuk institusi pendidikan tinggi vokasi harus memenuhi berbagai standar, yaitu: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.

Untuk menuju terpenuhinya Standar Pendidikan Nasional tersebut setiap sekolah mulai mengadakan penyesuaian secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga terdapat institusi pendidikan yang memasuki tahap rintisan, tahap potensial, tahap standar, tahap mandiri sampai puncaknya adalah bertaraf internasional.

Apabila institusi pendidikan termasuk lembaga pendidikan tinggi vokasi bisa bertaraf atau bersertikat internasional maka akan dapat meningkatkan daya saing institusi yang berdampak kepada daya saing lulusannya.

Untuk meningkatkan daya saing pendidikan nasional termasuk pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata memerlukan kekuatan sinergi antara kebijakan di wilayah hulu dan implementasi di wilayah hilir.

Daya saing pendidikan nasional dapat terwujud jika pola pengembangannya tidak bersifat pragmatik, tetapi sedapat mungkin bersifat holistik dan berangkat dari visi bersama antar seluruh *stakeholders* tentang pendidikan nasional bangsa ke depan termasuk didalamnya pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Namun pada konteks ketahanan nasional, Slamet PH 2011; menyatakan bahwa tujuan pendidikan vokasi guna memperkuat jati diri (karakter) sebagai bangsa Indonesia yang mencintai tanah air dapat dilakukan melalui empat pilar kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, tetap setia dan menjaga keutuhan NKRI. Setia terhadap NKRI diindikasikan seperti:

- 1) Memahami, menyadari, menjadikan hati nurani, mewajibkan hati nurani, mencintai dan bertindak nyata dalam menjagadan mempertahankan keutuhan NKRI.
- 2) Mampu menangkal manakala terjadi benturan antar nilai akibat globalisasi yang melanda dan merongrong keutuhan NKRI.
- 3) Melestarikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dan sekaligus terbuka terhadap gesekan-gesekan dengan kemajuan negara-negara lain.

4. Indikasi Keberhasilan

John Thompson (1973) beranggapan bahwa pendidikan vokasi harus diukur dari keberhasilan dan efisiensi ekonomi yang dihasilkan. Pendidikan vokasi adalah anak dari pembangunan ekonomi suatu bangsa. Pendidikan vokasi diselenggarakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karenanya, keberhasilan pendidikan vokasi harus dilihat dari sisi ekonomi.

Mengacu kepada pernyataan Thompson tersebut, maka indikator keberhasilan percepatan pembangunan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata berbasis *penta helix* adalah:

- a. Meningkatnya jumlah pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang terakreditasi. Seperti yang telah dijelaskan pada bab IV, bahwa dari 231 program studi pada 130 pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, hanya 46 prodi yang terakreditasi A, 139 terakreditasi B, dan sisanya terakreditasi C. Sementara itu, dari 130 perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata tersebut hanya 17 yang terakreditasi dengan predikat 1 terakreditasi A, 3 terakreditasi B, dan sisanya terakreditasi C24.

Percepatan pembangunan pendidikan tinggi bidang vokasi diharapkan dapat meningkatkan jumlah prodi yang terakreditasi A (minimal pada jumlah 115 prodi) serta peningkatan akreditasi institusi pada pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata (minimal pada 40 perguruan tinggi yang terakreditasi A & B) pada tahun 2019.

- b. Menurunnya angka pengangguran nasional. Angka pengangguran nasional berdasarkan data BPS 2017 adalah sebesar 7 juta jiwa dari 127,8 juta tenaga kerja nasional. Peningkatan pengelolaan pendidikan vokasi bidang pariwisata diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran nasional sampai dengan 5 juta pada 2019.

Ekonomi yang berkembang akan selalu membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung perkembangannya. Pendidikan vokasi

dibuat untuk mampu menjadi pemasok (*supplier*) kebutuhan tenaga kerja agar ekonomi suatu wilayah bisa berkembang.

Pasokan tenaga kerja ini haruslah stabil dan sesuai kebutuhan. Perencanaan pendidikan vokasi harus didasarkan prediksi yang baik atas kebutuhan tenaga kerja suatu daerah. Pendidikan vokasi harus mampu menjadi mitra sejalan dari pertumbuhan ekonomi.

- c. Tersedianya kebijakan sinergitas antar *stakeholders* dalam pengelolaan pendidikan vokasi bidang pariwisata. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pariwisata merupakan sektor ekonomi yang bersifat multi disiplin, hal ini sama dengan pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang juga bersifat multi sektoral.

Sebagai jenis pendidikan yang saat ini menjadi fokus pengembangan kualitas SDM nasional, maka diperlukan kebijakan yang minimal setingkat keputusan Kementerian Koordinator yang menaungi sinergitas *stakeholders* dalam pengelolaan pendidikan vokasi bidang pariwisata. Kebijakan ini dibutuhkan agar seluruh *stakeholders* yang ada dapat mendukung secara intensif dalam pembangunan SDM manusia bidang pariwisata secara nasional.

- d. Peningkatan daya saing SDM nasional. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Indonesia saat ini menduduki peringkat ke 41 dari 138 negara. Percepatan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata diharapkan dapat meningkatkan peringkat Indonesia menjadi ke-30 dunia pada 2019. Kondisi ini merupakan implikasi terhadap pengembangan SDM yang merupakan salah satu titik lemah daya saing Indonesia.

Indikator lain terhadap keberhasilan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang mengacu kepada pendapat Wijanarka, 2012; 11, menyatakan, karakteristik lulusan pendidikan vokasi agar bisa bertahan di era global yang selalu berubah adalah memiliki keterampilan pada bidangnya yang meliputi

pengetahuan, keterampilan, dan aplikasi pengetahuan dan ketrampilan, serta memiliki keterampilan generik yang berlaku untuk semua level kualifikasi, yaitu:

- a. Keterampilan-keterampilan dasar, misal, membaca dan berhitung sesuai dengan level dan tipe kualifikasinya.
- b. Keterampilan sosial seperti bekerja sama dan kemampuan berkomunikasi.
- c. Keterampilan berpikir seperti belajar bagaimana belajar (*learning to learn*), kemampuan mengambil keputusan, dan kemampuan memecahkan masalah.
- d. Keterampilan personal seperti mandiri dan integritas

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto (2016-2019) menyatakan bahwa kontribusi industri pengolahan nonmigas masih sebesar 20% terhadap ekonomi nasional. Harapan Hartato bahwa program pendidikan vokasi bisa masuk ke industri strategis yang nantinya mereka dapat menjadi *entrepreneur* yang membangun industri kecil dan menengah sehingga mampu meningkatkan peran manufaktur di dalam ekonomi nasional sebesar 25%.

BAB VI

KONSEP PENDIDIKAN VOKASI BIDANG PARIWISATA YANG DIHARAPKAN

1. Pandangan Umum

Dalam menghadapi persaingan global saat ini, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah menerapkan program-program pembangunan yang disusun dalam **NAWACITA**, adapun target-target pembangunan 2015-2019 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada penjelasan dan gambar berikut ini:



- a. Target pembangunan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 6%-8% per tahun yang didukung industri dengan nilai tambah tinggi. PDB per kapita tahun 2019 mencapai USD 7.000, tingkat kemiskinan menjadi 6%-8% tahun 2019, infrastruktur dasar sudah terpenuhi 100% yang mencakup elektrifikasi, air bersih, dan kelayakan jalan raya 100%²⁵. Tahun 2020 sasaran pembangunan makro ekonomi pertumbuhan bangsa Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 1.5 Sasaran Makro Pembangunan 2020 - 2024



Sumber: RPJMN 2020-2024

- b. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan hidup. Produksi padi 46 juta ton (naik 2,9% per tahun) dan pangan protein meningkat, penurunan emisi mendekati 26%, hilirisasi hasil tambang dan pertanian hasil hutan dan perikanan, serta pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati termasuk ekowisata dan wisata bahari.
- c. Pembangunan daerah, pemerataan ekonomi Jawa dan luar Jawa sama sama tumbuh, kabupaten tertinggal turun dari 114 menjadi 39 kabupaten pada 2019, termasuk daerah perbatasan dan terpencil.
- d. Pembangunan basis politik dan hukum, konsolidasi demokrasi, praktik korupsi menurun, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- e. Pembangunan sosial, membaiknya kualitas pendidikan dan kualitas SDM serta kesehatan angka bayi menurun menjadi 25 per 1000.

- f. Pendidikan merupakan salah satu tujuan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Berdasarkan BPS 2017 menyatakan bahwa angka pengangguran pada bulan Februari 2017 mengalami penurunan sebesar 0,28% (5.33%) dari 5.61% pada bulan Agustus 2017.

Di Kementerian Industri sendiri lewat program vokasi industri menargetkan tenaga kerja dari tahun 2017- 2019 harus meningkat. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan profil lulusan yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang.



Dalam menekan angka pengangguran secara tepat guna adalah mengembangkan pendidikan vokasi, yang mana pendidikan vokasi ini akan dapat meningkatkan *link and match* kontribusi SDM nasional maupun global pada dunia kerja.

Berdasarkan Kementerian Perindustrian target tenaga kerja melalui program vokasi industri pada tahun 2019 akan mencapai target sebesar 1.00.00 tenaga kerja produktif. Hal ini terekam pada gambar keadaan tenaga kerja Indonesia berikut:

Pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang diharapkan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan nasional, memerlukan jumlah SDM yang

berkualifikasi dalam jumlah yang besar yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta mampu menjadi daya saing nasional.

Pariwisata Indonesia memiliki peluang tinggi, beberapa hal yang mendukung tingginya peluang pariwisata Indonesia antara lain:

- a. Meningkatnya pertumbuhan wisatawan mancanegara dan nusantara.
- b. Target kunjungan yang meningkat dua kali lipat pada 2019 dibandingkan tahun 2015.
- c. Meningkatnya daya saing pariwisata Indonesia.
- d. Meningkatnya *awarness* global dan nasional terhadap sumber daya pariwisata nasional.

Kebutuhan akan SDM pariwisata ini merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelayanan kepariwisataan kepada wisatawan. Para wisatawan, memiliki ekspektasi tertentu ketika mengunjungi destinasi wisata (Yahya, 2017). Sektor pariwisata Indonesia membutuhkan 2,5 juta sumber daya manusia yang bekerja penuh waktu langsung (*full-time & direct*) di berbagai bidang selama tahun 2017. Sedangkan kebutuhan SDM *indirect* dan *induce* mencapai tiga sampai empat kali lipat dari kebutuhan tenaga kerja langsung.

Dari 2,5 juta tenaga kerja yang bekerja secara langsung di berbagai sektor pariwisata, pemerintah menargetkan 1.098.000 orang harus memiliki sertifikasi kompetensi (Pitana, 2017). Keselarasan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja merupakan isu yang selalu aktual terutama dalam kerangka pendidikan vokasi (*vocational education*). Hal ini tidak terlepas dari esensi maupun karakteristik pendidikan vokasi sebagai bagian dari pendidikan yang menyiapkan lulusannya siap memasuki dunia kerja.

Dapat pula dimaknai bahwa pendidikan vokasi pada dasarnya merupakan jembatan menuju dunia kerja, sehingga keberhasilannya dapat dinilai dari seberapa dekat jalinan maupun relevansinya dengan dunia kerja.

Pendidikan vokasi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang menyiapkan lulusannya untuk memasuki dunia kerja dituntut mampu menghasilkan *learning outcome* yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Disamping itu, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan agen perubahan dalam meningkatkan

ketahanan, daya saing, dan kejayaan bangsa. Oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan kebijakan, strategi, maupun upaya dalam meningkatkan peran serta lembaga pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan dalam mewujudkan sektor pariwisata nasional sebagai sektor unggulan nasional, serta pencapaian target wisatawan nusantara sebesar 20 juta orang pada 2019.

2. Kebijakan Pendidikan dalam Bidang Vokasi

Melalui Inpres No 6 tahun 2014, pemerintah terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam Inpres ini, Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang dimulai pada 2015.

Sebagai upaya meningkatkan daya saing dan mengoptimalkan seluruh potensi sektor prioritas domestik, sektor jasa keuangan harus menjadi katalisator yang signifikan dan motor perekonomian di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian global.

Adapun pengembangan sektor prioritas meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, energi, industri, dan pariwisata. Namun secara garis besar, ada persoalan besar yang menjadi kendala pembangunan kepariwisataan nasional, yakni:

- a. Masih terkonsentrasinya distribusi wisatawan pada wilayah tertentu.
- b. Masih minimnya pengembangan daya tarik yang dikembangkan secara kreatif dan menarik pada daerah-daerah di Indonesia.
- c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia bidang pariwisata.

Kebijakan pendidikan dalam bidang vokasi telah ditetapkan dalam UU no. 12 tahun 2012 tentang sistem pendidikan nasional. Di dalam UU ini telah dijelaskan secara rinci tentang eksistensi pendidikan vokasi, jenjang pendidikan vokasi, maupun pelaksanaan pendidikan vokasi.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan vokasi telah dilindungi oleh Undang-Undang. Ali Imron dalam bukunya *Analisis Kebijakan Pendidikan* menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Pengertian kebijakan pendidikan (*educational policy*) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional.

Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu produk yang dijadikan sebagai panduan pengambilan keputusan pendidikan yang legal-netral dan disesuaikan dengan lingkungan hidup pendidikan secara moderat.

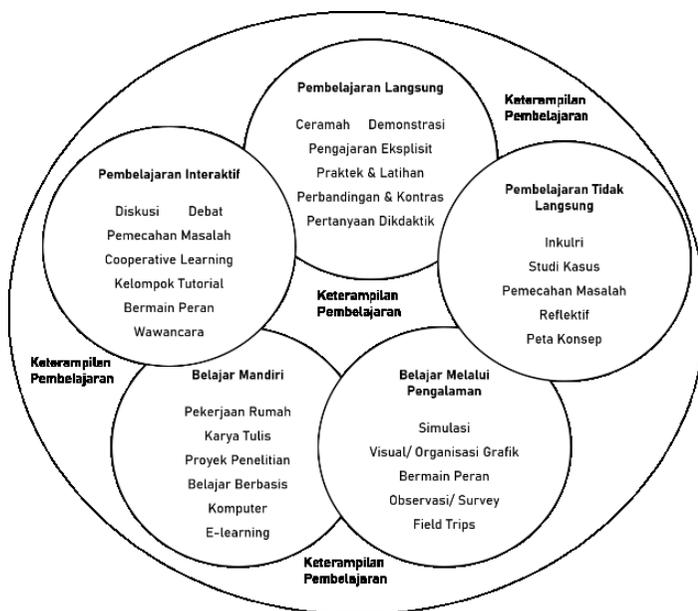
Mengacu kepada pokok permasalahan pada buku ini, maka kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata Berbasis Penta Helix Melalui Optimalisasi Manajemen Pendidikan Vokasi, Kebijakandan Regulasi, Kurikulum dan Standar Global.

Dalam restrukturisasi kebijakan pendidikan ini diharapkan dapat memuat delapan agenda penting yang harus menjadi pusat perhatian sebagai konsekuensi logis dari reformasi bidang pendidikan, yaitu: (1) pendidikan untuk semua, (2) pendidikan persiapan kerja, (3) pendidikan tinggi keilmuan, (4) pendidikan guru dan tenaga kependidikan, (5) kurikulum dan proses pendidikan, (6) pembiayaan pendidikan, (7) pendidikan masyarakat, dan (8) desentralisasi pengelolaan pendidikan (Suryadi dan Budimansyah, 2004:167).²⁶

Pengembangan pendidikan vokasi akan mampu meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia serta mengatasi pengangguran di Indonesia. Sebagai negara berkembang, kebutuhan atas tenaga kerja di Indonesia masih sangat tinggi, namun dilihat dari realita yang ada, justru jumlah pengangguran di Indonesia masih banyak.

Di Indonesia ada berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan. Hal ini dapat terekam dalam lima model pembelajaran yaitu pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, pembelajaran interaktif, pembelajaran mandiri, dan belajar dari pengalaman.



3. Strategi

Persaingan perekonomian pada abad XXI mengarah kepada padat modal dan padat teknologi berbasis pengetahuan dengan nilai tambah yang tinggi masih merupakan beban dan ancaman bagi Indonesia. Sebab, kesiapan sumber daya manusia tersistem masih belum kuat.

Ini menjadi tantangan bagi dunia pendidikan vokasi dalam menyiapkan manusia Indonesia yang cakap dan terampil serta mempunyai kompetensi global yang handal. Indonesia cenderung masih berada di antara ekonomi industri padat tenaga kerja, padat ruang dengan nilai tambah rendah, bergeser menuju padat modal dan padat teknologi berbasis pengetahuan dengan nilai tambah yang tinggi.

Fungsi pendidikan vokasi adalah menyiapkan peserta didik menjadi tenaga kerja produktif, antara lain meliputi:

- a. Memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri.
- b. Menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan bagi orang lain.
- c. Mengubah status siswa dari ketergantungan menjadi bangsa yang berprestasi (produktif).

Pariwisata sebagai salah satu bidang yang mengandalkan pendidikan tinggi berbasis vokasi sebagai “kawah candradimuka” SDM bidang pariwisata, harus dapat menerapkan berbagai strategi sebagai salah satu upaya

meningkatkan daya saing kepariwisataan nasional pada tingkat regional dan internasional.

Strategi-strategi yang dapat diimplemtasikan pada pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

Strategi-1: Optimalisasi Manajemen Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata adalah melakukan Transformasi Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata.

Tujuan dari strategi pertama, adalah untuk memenuhi tuntutan pasar kerja yang semakin tinggi akibat adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan tantangan utama yang dihadapi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Hal ini menuntut pendidikan kejuruan untuk melaksanakan program-program yang tepat sehingga tidak terlalu berat bebannya dalam mengimbangi kemajuan teknologi.

Untuk itu, program-program pembelajaran di sekolah-sekolah kejuruan dituntut untuk selalu responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran vokasi bidang kepariwisataan dapat dijabarkan dalam tiga keperluan yaitu teknologi sebagai ilmu, teknologi sebagai produk, dan teknologi sebagai cara atau sistem.

Sebagai ilmu terapan, teknologi mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan perancangan/rekayasa untuk menemukan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

Dalam perkembangannya, produk teknologi bukan hanya berupa produk kebendaan, tetapi juga pengembangan suatu sistem yang mendukung layanan/jasa. Dalam konteks peranan *penta helix* dalam strategi transformasi pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. **Pemerintah:** Pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator adalah memberikan dukungan dalam memfasilitasi pelaksanaan

perubahan tata kelola pada pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

- b. **Akademisi:** Melakukan penelitian serta mengembangkan konsep tata kelola pendidikan vokasi bidang pariwisata
- c. **Usaha / Industri Pariwisata:** Memberikan *input* terhadap peluang pengelolaan pendidikan tinggi bidang pariwisata yang berbasis kepada peningkatan kapasitas institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- d. **Masyarakat:** Sebagai penerima manfaat serta berperan aktif dan membangun suasana kondusif dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata
- e. **Media:** Sebagai sarana penyebaran informasi dalam meningkatkan *awarness* yang bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Metode yang digunakan adalah menyelaraskan pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang berbasis teknologi kekinian dengan tren kebutuhan industri kepariwisataan.

Sarana yang digunakan dalam strategi ini adalah pedoman pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang yang berbasis kepada teknologi kekinian.

Strategi-2: Strategi Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata adalah Sinergitas dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata.

Berhubung pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi yang bersifat multisektoral, maka harus banyak *stakeholders* yang terlibat. Dalam pendidikan tinggi bidang kepariwisataan, juga dituntut bersifat multidisiplin, sehingga dibutuhkan berbagai sektor dalam mendukung pelaksanaan pendidikan kepariwisataan.

Sinergi berbagai kementerian, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjawab kendala-kendala dalam pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan. Peranan *penta helix* dalam strategi sinergitas dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. **Pemerintah:** Pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator dalam menetapkan kebijakan yang dapat mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan.
- b. **Akademisi:** Melakukan penelitian serta mengembangkan konsep sinergitas melalui pemetaan serta fungsi dari masing-masing *stakeholders* dalam mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan.
- c. **Usaha/Industri Pariwisata:** Memberikan dukungan secara intensif terhadap pembelajaran aktif mahasiswa serta penyaluran lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan.
- d. **Masyarakat:** Sebagai penerima manfaat serta berperan aktif dan membangun suasana kondusif dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- e. **Media:** Sebagai sarana penyebaran informasi dalam meningkatkan *awarness* yang bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Hal lain yang terkait pada sinergitas ini adalah, seluruh *stakeholders* yang terkait dengan bidang kepariwisataan dapat memfokuskan aktivitas birokrasi maupun aktivitas ekonominya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi kepariwisataan.

Metode dalam strategi ini adalah dengan mengidentifikasi dan peran masing-masing *stakeholders* dalam mendukung perkembangan pendidikan tinggi bidang vokasi.

Sarana yang digunakan dalam strategi ini adalah terbentuknya sebuah wadah atau ruang yang dilegalkan sebagai bentuk partisipasi dalam pengembangan serta percepatan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

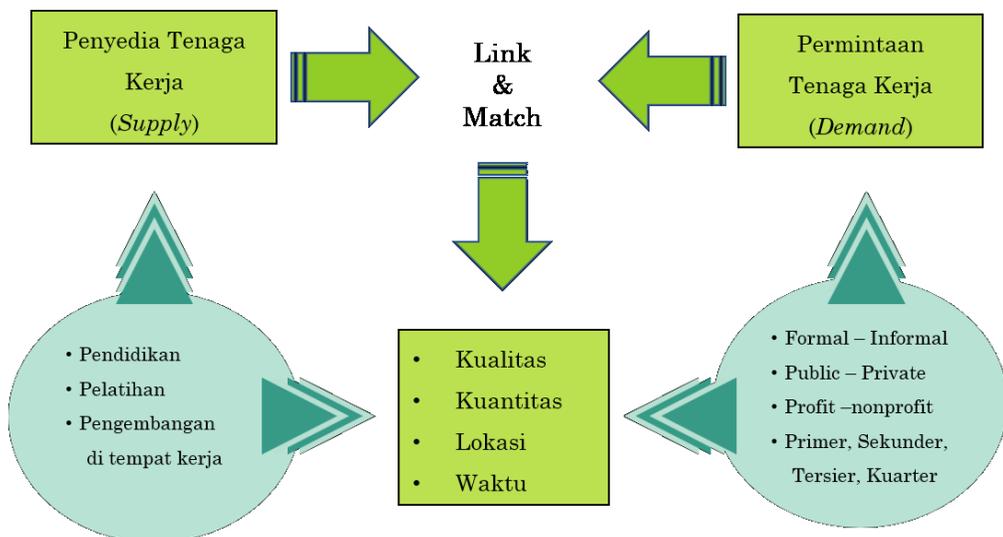
Strategi-3: Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata adalah Restrukturisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata.

Tujuan strategi ini adalah penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan perkembangan industri pariwisata. Dengan demikian pihak industri pariwisata secara bersama-

sama dengan pendidikan tinggi vokasi berperan aktif untuk ikut menentukan, mendorong, dan menggerakkan pendidikan dan pelatihan kejuruan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pendidikan.

Konsep *link and match supply demand* Tenaga Kerja yang dikemukakan oleh Slamet PH, 2011;197, menyatakan bahwa penyedia tenaga kerja (*supply*) melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tempat kerja yang disesuaikan dengan permintaan tenaga kerja (*demand*) pada industri formal-informal, privat-publik, profit-non profit serta industri primer, sekunder, tersier, dan kuarter.

Konsep ini akan mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu terhadap kebutuhan industri. Berikut data yang menggambarkan *link and match supply demand* Tenaga Kerja adalah:



Sumber: Slamet PH, 2011;197

Maka itu, diupayakan agar pendidikan vokasi lebih mengarah kepada *demand-driven* dari pada *supply-driven* yang dilakukan melalui pembelajaran yang lebih aktual dan konkret. Karena itu, pendidikan vokasi dituntut untuk relevan dengan dunia kerja.

Peranan *penta helix* dalam strategi restrukturisasi kurikulum pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata adalah sebagai berikut:

- a. **Pemerintah:** Pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator adalah memfasilitasi pelaksanaan restrukturisasi kurikulum pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kurikulum.
- b. **Akademisi:** Melakukan penelitian serta mengembangkan kurikulum sesuai kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, baik pada tingkat lokal, regional, maupun global.
- c. **Usaha/Industri Pariwisata:** Memberikan *input* soal kebutuhan kompetensi lulusan serta dukungan sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kurikulum selama proses belajar mengajar.
- d. **Masyarakat:** Sebagai penerima manfaat, aktif membangun suasana kondusif dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- e. **Media:** Sebagai sarana penyebaran informasi, ikut meningkatkan *awareness* yang bertanggung jawab terhadap pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Metode yang digunakan dalam strategi ini adalah menyelaraskan antara kurikulum di pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dengan kebutuhan industri pariwisata. Penyelarasan ini juga harus mempertimbangkan kurikulum nasional dan kebutuhan kompetensi industri serta target strata/level pekerjaan lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Sarana yang dapat digunakan dalam penyelarasan kurikulum ini adalah dengan melaksanakan *workshop* antara institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dengan industri pariwisata di wilayah tertentu. Kurikulum yang merupakan hasil penyelarasan tersebut sebaiknya dievaluasi kembali minimal tiga tahun sekali dalam bentuk *workshop* kembali.

Strategi-4: Strategi Globalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata adalah Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata.

Tujuan dari internasionalisasi dalam pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, dipandang sebagai salah satu cara untuk memodernisasikan pengelolaan pendidikan vokasi khususnya pada bidang pariwisata yang saat ini banyak yang tertinggal dari negara lain.

Internasionalisasi dimaknai dengan membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi (maupun sekolah) di luar negeri, demi terciptanya transfer dan pertukaran pengetahuan. Selain itu, dalam internasionalisasi, pengelolaan pendidikan tinggi bidang vokasi menggunakan standar-standar global.

Deskripsi terhadap peranan *penta helix* dalam implementasi strategi internasionalisasi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Pemerintah:** Pemerintah pusat maupun daerah sebagai fasilitator dapat memberikan dukungan kepada institusi pendidikan tinggi vokasi dalam melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata di luar negeri serta kebijakan dalam mendukung implementasi kerjasama tersebut.
- b. **Akademisi:** Melakukan dukungan informasi terhadap implementasi kerjasama institusi maupun distribusi lulusan di luar negeri serta melakukan kajian terhadap peluang dan manfaat dalam implementasi strategi ini.
- c. **Usaha Industri Pariwisata:** Memberikan dukungan peluang maupun informasi dalam pelaksanaan distribusi lulusan institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata pada industri kepariwisataan di luar negeri.
- d. **Masyarakat:** Sebagai penerima manfaat, berperan aktif dalam membangun suasana kondusif serta mendukung implementasi strategi ini.
- e. **Media:** Sebagai sarana penyebaran informasi dalam meningkatkan *awarness* akan keberadaan institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata nasional, baik kepada institusi atau industri, maupun media partner secara global.

Metode yang digunakan dalam strategi ini adalah pelaksanaan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata di Indonesia dengan pendidikan sejenis maupun industri pariwisata di luar negeri.

Sarana yang digunakan dalam strategi ini adalah penandatanganan MoU institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata di Indonesia dengan pendidikan sejenis maupun industri pariwisata di luar negeri.

1. Upaya Revitalisasi Pembangunan Pendidikan Vokasi Berbasis Pariwisata *Penta Helix*

Guna mengimplementasikan kebijakan revitalisasi pembangunan pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *penta helix* melalui optimalisasi manajemen pendidikan vokasi, kebijakan dan regulasi, kurikulum dan standar global serta strategi-strategi di atas, maka upaya yang dapat dilakukan adalah:

Transformasi pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata. Agar penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata berjalan efektif, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan, yakni:

- a. Pelaksanaan praktik dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan pada industri pariwisata.
- b. Dilatih kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- c. Tenaga pengajar/ instruktur/ dosen telah memiliki pengalaman sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja di industri pariwisata.
- d. Perilaku pendidikan tinggi disesuaikan dengan perilaku pekerjaan yang akan dilakukannya.

Adapun upaya yang dapat dilakukan terkait dengan pencapaian strategi transformasi pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata adalah:

a. Modernisasi Sistem Manajemen dan Sistem Pengajaran yang Berbasis Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi sudah menjadi keharusan dalam menghadapi era persaingan global. Institusi/ Industri/ instansi

yang tidak memanfaatkan teknologi dalam aktivitasnya akan tertinggal dan terlindas dalam sistem ekonomi internasional.

Pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata harus juga memanfaatkan teknologi dalam pelayanan kepada mahasiswa serta administrasi pendidikan. Sistem informasi pendidikan harus dikembangkan secara terintegrasi sehingga memudahkan pendataan dan pelayanan kepada sivitas akademika pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Selain pelayanan administrasi akademik, pemanfaatan teknologi juga harus berlaku pada pelaksanaan pembelajaran baik teori maupun praktik. Implementasi *e-learning* maupun *e-teaching* sudah harus diterapkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

b. Implementasi *Tracer Study*

Penelusuran terhadap lulusan pendidikan vokasi bidang pariwisata merupakan salah satu cara dalam menilai efektivitas pembelajaran yang dilakukan kepada mahasiswa. Dalam *tracer study* ini akan menitikberatkan kepada kemampuan lulusan pendidikan vokasi bidang pariwisata dalam berinteraksi dan berkontribusi kepada dunia kerja sebagai hasil kompetensi yang dimilikinya pada saat lulus pendidikan vokasi bidang pariwisata.

c. Penguatan Tata Kelola Institusi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata

Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik merupakan salah satu rencana kerja pendidikan nasional. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan dalam tata kelola pendidikan tinggi adalah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengelolaan pendidikan, baik dari segi pelaksanaan maupun penganggaran dalam mewujudkan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel sehingga dapat menciptakan citra dan pelayanan sekolah yang bermutu.

Guna mencapai tujuan tersebut, sudah dilakukan adalah melalui otonomi dan desentralisasi pendidikan tinggi yang memberikan keleluasaan dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan arahan umum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Lembaga pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata berfungsi menghubungkan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Pendidikan vokasi bidang pariwisata diarahkan sebagai penyedia calon pekerja “entry level”, namun pekerja yang harus siap berkembang menjadi ahli/expert dalam spesialisasi bidang kerja tertentu.

Lembaga pendidikan tinggi vokasi harus mengubah paradigma yang tidak hanya mencetak “pekerja teknis” yang “kalah kelas” dibanding para sarjana pendidikan umum yang memiliki peluang karier lebih luas dan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi vokasi harus menjadi pencetak lulusan yang memiliki kapasitas untuk terus maju dalam mendalami bidang kerja yang dipilih dan memiliki motivasi serta kreativitas untuk selalu mengembangkan kompetensi mereka hingga akhir hayat (*life-long learning principle*).

Penguatan tata kelola pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata, terutama pada:

a. Calon Peserta Didik.

Terdapat paradigma bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan kelas dua, sehingga *input* calon peserta didik pada umumnya berasal dari yang tidak lulus seleksi di pendidikan tinggi akademik. Dalam hal ini lembaga pendidikan tinggi harus mampu menjangkau calon peserta didik yang telah memiliki kualifikasi tinggi dengan memberikan gambaran prospek pekerjaan maupun keberlanjutan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

b. Peserta Didik

Apabila peserta didik telah mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan tinggi vokasi, peserta didik harus

juga selalu dievaluasi perkembangan dalam masa pendidikan. Jika memang terjadi deviasi minat dan bakat dalam proses pendidikan, haruslah dicari solusi untuk menyesuaikannya.

Lembaga pendidikan tinggi vokasi juga harus memiliki unit “bimbingan karier” yang bisa memberi arahan dan bimbingan bagi para peserta didik untuk dapat memilih jurusan yang terbaik bagi dirinya.

c. Tenaga Pengajar/Instruktur/Dosen.

Keberadaan tenaga pengajar/instruktur/dosen yang kompeten merupakan unsur utama dalam membentuk lulusan yang berkualitas. Idealnya para pendidik ini harus sesuai proporsinya, yaitu memiliki kompetensi yang tinggi selain memiliki jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam UU no 12 tahun 2012.

Jenis pendidik ini tentunya akan “mahal” dan harus dibuatkan suatu mekanisme *reward* yang kompetitif. Idealnya, para pekerja yang ahli dan berpengalaman justru harus menjadi pendidik di pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata dan harus dijadikan tujuan dan komitmen semua pihak.

Jika pendidik adalah para ahli “kelas teri” maka sulit berharap bahwa lulusannya akan memiliki kelas yang tinggi.

Para pendidik di lembaga pendidikan tinggi vokasi ini harus selalu mengikuti dan terexpose dengan kemajuan industri, termasuk industri pariwisata yang memiliki tingkat kedinamisan yang tinggi. Dalam konteks ini, juga harus dilakukan pengaturan dalam suatu sistem di mana terjadi kegiatan pertukaran antara para pendidik dan pekerja ahli dari dunia kerja untuk bertukar peran dan tempat kerja.

a. **Penggunaan teknologi informasi (*e-commerce*) dalam meningkatkan eksistensi institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.**

Institusi pendidikan saat ini dituntut agar mampu eksis tidak hanya melalui kualitas lulusannya tapi juga terhadap eksistensi institusi pendidikannya. Pemanfaatan teknologi

informasi yang telah menjadi keharusan dalam kehidupan pada Abad ke XXI juga harus dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Terinformasikannya institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata akan mampu memberikan manfaat terutama pada hubungan kerja sama maupun penyerapan lulusannya.

b. Penguatan anggaran pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang masih berada di bawah lintas kementerian sebesar 3,08% dari total anggaran pendidikan APBN sebesar 20%.

Pengelola pendidikan vokasi yang pada umumnya dimiliki oleh kementerian, teknis yang dianggarkan sebesar 3.08%. Dalam upaya percepatan pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata, sudah seharusnya dilakukan penguatan anggaran minimal 5 % dari anggaran pendidikan di APBN.

Asumsi peningkatan nilai tersebut merupakan dukungan anggaran terhadap kementerian teknis yang memiliki institusi pendidikan tinggi vokasi. Hal ini dibutuhkan karena berdasarkan kebijakan pendidikan nasional, institusi pendidikan tinggi berada di bawah pengelolaan Kemenristekdikti, sementara kementerian teknis masih membutuhkan institusi pendidikan yang telah dikelolanya sejak lama.

Meskipun dalam RAPBN 2018, anggaran pendidikan naik sebesar Rp 14,2 Triliun²⁷, dan harus diikuti oleh peningkatan proporsi anggaran yang memadai antara pendidikan tinggi di bawah Kemenristek dan pendidikan tinggi di bawah K/L.

Sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas SDM nasional, dukungan terhadap pembinaan SDM vokasi perlu mendapatkan dukungan dari Kemenristekdikti.

Upaya Strategi-2: Beberapa upaya mewujudkan sinergitas pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata antara lain:

a. Pemetaan *stakeholders* dalam pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Pariwisata adalah bidang ekonomi yang bersifat multisektoral yang menjadikan sektor pariwisata memiliki banyak *stakeholders* yang terlibat. Dalam pendidikan tinggi bidang kepariwisataan, juga dituntut bersifat multidisiplin, sehingga dibutuhkan berbagai sektor dalam mendukung pelaksanaan pendidikan kepariwisataan.

Demikian beragamnya *stakeholders* kepariwisataan, maka diperlukan pemetaan terhadap fungsi dan peran dari *stakeholders* di suatu wilayah terhadap pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

b. Institusionalisasi *stakeholders* terkait dengan dukungan terhadap pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Hasil pemetaan tersebut diharapkan dapat terbentuk forum komunikasi atau organisasi yang terdiri dari *stakeholders* kepariwisataan yang dapat memberikan dukungan terhadap pengelolaan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Sifat organisasi ini adalah peran dukungan yang didelegasikan dengan surat keputusan tingkat kementerian atau surat keputusan tingkat daerah. Dalam organisasi tersebut, seluruh *stakeholders* yang terkait dengan bidang kepariwisataan dapat memfokuskan aktivitas birokrasi maupun aktivitas ekonominya dalam mendukung pengembangan pendidikan tinggi kepariwisataan.

c. Revitalisasi peran industri pariwisata dalam peningkatan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata (program industri masuk sekolah).

Seperti telah disebutkan sebelumnya, sebagai upaya peningkatan lulusan pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata dibutuhkan penyesuaian antara pendidikan vokasi dengan dunia industri pariwisata.

Dalam program penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian dari *supply side* dan *demand side*. Penyesuaian dari *supply side* merupakan upaya penyesuaian lulusan yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang direpresentasikan melalui tingkat penyerapan tenaga kerja. Sedangkan penyesuaian dari *demand side* direpresentasikan melalui tingkat pemenuhan permintaan dunia kerja (diadopsi dari Indriaturrahi & Sudiyatno 2016;165).

Pardjono (2011;5) menjelaskan bahwa terdapat dua teori belajar pada industri secara langsung, yaitu *situated learning* dan *work-based learning*. *Situated Learning* merupakan teori yang mempelajari akuisisi pengetahuan dan keterampilan yang digunakan di dunia kerja. Sementara, *Work-based learning* (WBL) adalah bentuk pembelajaran kontekstual dimana proses pembelajaran dipusatkan pada tempat kerja dan meliputi program yang terencana dari pelatihan formal dan mentoring, dan pencarian pengalaman kerja yang mendapatkan gaji.

Dalam perencanaan pendidikan vokasi, keterlibatan industri pariwisata ikut menentukan program dan bidang keahlian yang dibutuhkan termasuk dalam penyusunan kurikulum (kurikulum berbasis kompetensi). Industri Pariwisata ikut menentukan standar kompetensi *soft skills* dan *hard skills* yang harus dicapai oleh setiap lulusan pendidikan vokasi secara terintegrasi dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti. Industri pariwisata akan ikut berperan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi termasuk dalam pelaksanaan pembelajaran, pembentukan iklim industri, optimalisasi bimbingan karier, maupun evaluasi agar hasil pendidikan dapat sesuai dengan *link and match* terhadap industri pariwisata di wilayah tersebut.

Dari penjelasan di atas, peran industri pariwisata diharapkan berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi yang antara lain adalah:

- 1) Sebagai tempat praktik. Industri sebagai tempat praktik selain untuk meningkatkan kompetensi peserta didik pada bidang teknis (operasional), juga dapat dimanfaatkan sebagai penyelesaian *gap* terhadap kekurangan peralatan maupun keahlian spesifik yang tidak dimiliki oleh pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- 2) Sebagai tempat magang. Sistem magang (*apprenticeship*) merupakan sistem pendidikan kejuruan yang paling tua dalam sejarah pendidikan vokasi. Sistem magang merupakan sistem yang cukup efektif untuk mendidik dan menyiapkan seseorang untuk memperdalam dan menguasai keterampilan yang lebih rumit yang tidak mungkin atau tidak pernah dilakukan melalui pendidikan massal pada pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.
- 3) Sebagai tempat belajar manajemen industri dan wawasan dunia kerja. Selain peningkatan kompetensi pada bidang teknis (operasional), industri pariwisata dapat menjadi media dalam memberikan gambaran terhadap manajemen perusahaan maupun suasana kerja/filosofi perusahaan. Hal ini akan mempermudah peserta didik dalam beradaptasi pada dunia kerja.
- 4) Partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata. Sebagai perwujudan terhadap *link and match* antara pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dan industri pariwisata, maka industri pariwisata harus diajak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata, baik dalam penyusunan kurikulum maupun penyediaan fasilitas fisik. Hal ini diharapkan akan mampu mencapai tujuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang pariwisata

Upaya Strategi-3: Beberapa upaya restrukturisasi kurikulum pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, yakni:

- a. Evaluasi kurikulum. Pendidikan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyiapan SDM

berkualitas, tangguh, dan terampil. Dalam pelaksanaan pendidikan vokasi bidang pariwisata, memiliki tujuan agar menghasilkan lulusannya berkarakteristik “siap kerja” pada industri pariwisata, dengan demikian maka penetapan tujuan kurikulum harus didasarkan kepada peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM.

Tujuan kurikulum akan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sebagai berikut:

- 1) *Critical and creative thinking*
- 2) *Information/digital literacy*
- 3) *Inquiry/reasoning skills*
- 4) *Interpersonal skills*
- 5) *Multicultural/multilingual literacy*
- 6) *Problem solving*
- 7) *Technological skills*

Berdasarkan tujuan di atas maka institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dapat melakukan evaluasi terhadap bobot masing-masing keahlian yang harus dimiliki serta penyebarannya pada jadwal perkuliahan.

- b. Reorientasi kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum tersebut akan diikuti oleh penyusunan kembali kurikulum pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.

Reorientasi kurikulum ini disesuaikan dengan keahlian yang diharapkan harus dimiliki oleh lulusan pendidikan vokasi bidang pariwisata sehingga dibutuhkan penyusunan kurikulum yang mampu menjembatani antara pengetahuan yang diharapkan dengan kebutuhan dari industri pariwisata.

Dalam reorientasi kurikulum ini diharapkan sesuai dengan empat pilar pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO sebagai upaya peningkatan kemampuan peserta didik secara berkelanjutan seperti tampak pada penjelasan dan gambar berikut ini:

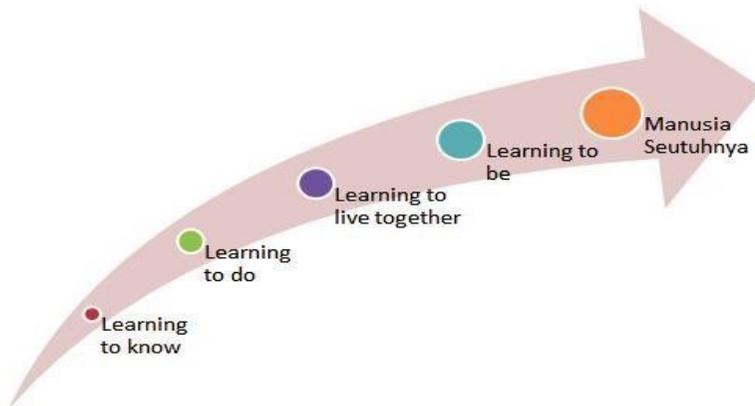
- 1) *Learning to know* (belajar mengetahui). Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui (*learning to know*) dalam prosesnya tidak sekadar mengetahui apa yang bermakna tetapi juga sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya. Dalam konteks ini sangat tinggi peran dari dosen/tenaga pengajar/instruktur dalam penyampaian materi.
- 2) *Learning to do* (belajar melakukan sesuatu). Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu (*learning to do*). Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, peningkatan kompetensi, serta pemilihan, dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu stimulus.

Pendidikan membekali manusia tidak sekadar untuk mengetahui, tetapi lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan.

- 3) *Learning to be* (belajar menjadi sesuatu). Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri di mana hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya.

Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri.

- 4) *Learning to live together* (belajar hidup bersama). Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama



Gambar 2. Pilar Pembelajaran menurut UNESCO

Sumber: UNWTO, 2011

Reorientasi kurikulum serta pedagogik dalam pendidikan vokasi bidang pariwisata, TEDQUAL-UNWTO, 2016, telah mengembangkan standar penyusunan serta hasil meliputi:

1. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi di bidang pariwisata pada tahap awal dengan mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi atau yang dapat disebut sebagai “*learning outcomes*”. Dari learning outcome maka dilanjutkan dengan penyusunan capaian pembelajaran dan kemudian diterjemahkan ke dalam mata pelajaran.
2. Hubungan kurikulum. Seperti diketahui bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan dalam menciptakan *link and match* dengan industri yang dideskripsikan dalam capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang kualifikasi.

Dalam pendidikan vokasi bidang pariwisata, hubungan antara kebutuhan industri serta perkembangan industri pariwisata menjadi fokus dalam menetapkan kurikulum. Hubungan ini tidak saja melihat kebutuhan industri, yang diterjemahkan dalam hubungan antara jenjang pendidikan, hubungan antara mata pelajaran, hubungan antara pedagogik dan lain-lain sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

3. Efektivitas terhadap metode pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, yaitu kemampuan tenaga pengajar/instruktur/dosen dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
4. Ketersediaan dan penggunaan fasilitas pendukung kurikulum. Pencapaian kemampuan terhadap peserta didik dalam pendidikan vokasi bidang pariwisata tidak hanya terletak kepada ketersediaan kurikulum, namun berbagai peralatan dan laboratorium yang mendekati atau sesuai dengan yang digunakan oleh industri pariwisata.

Tentunya ketersediaan ini bukan hal yang mudah dan murah mengingat perkembangan trend teknologi dalam industri pariwisata berkembang secara pesat. Kondisi ini seringkali menjadi kendala bagi lembaga pendidikan vokasi dikarenakan mahalnya peralatan serta tingginya perubahan fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran vokasi bidang pariwisata.

- c. Reorientasi tata kelola sivitas akademika pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata. Karena keberadaan tenaga pengajar/instruktur/ dosen yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Seperti diketahui bahwa hampir di semua negara selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan pengajar/instruktur/dosen yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan, serta kesejahteraan hidup yang memadai. Tenaga pengajar/instruktur/ dosen yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan vokasi bidang pariwisata yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, tenaga pengajar/ instruktur/

dosen harus mampu menemukan jati diri dan mengaktualkan diri.

Tenaga pengajar/instruktur/dosen adalah tenaga profesional mengandung arti bahwa profesi tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi, sementara itu kompetensi tenaga pengajar/ instruktur/dosen meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Sertifikasi Tenaga pengajar/instruktur/dosen harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah, dan dilaksanakan secara obyektif, transparan dan akuntabel.

Profesionalisme lebih ditekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya.

Profesionalisme tenaga pengajar/instruktur/dosen bukan hanya sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen, namun lebih kepada sikap dan pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, jadi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi juga memiliki tingkah laku yang dipersyaratkan.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme, berbagai aspek perubahan maupun peningkatan sivitas akademika dapat disebutkan di bawah ini, antara lain:

1. Proses seleksi. Sesuai dengan UU no 12 tahun 2012 pasal 21-23 yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi pada konteks tenaga pengajar/instruktur/dosen harus memenuhi ketentuan:

- a) Program diploma dan sarjana terapan: Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.
- b) Program magister terapan: Wajib memiliki dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.
- c) Program doktor terapan: Wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat.

Karena pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan (Pasal 16), selain gelar akademik juga harus memiliki pengalaman bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.

Inilah kondisi yang diharapkan dalam proses seleksi tenaga pengajar/dosen pendidikan vokasi termasuk bidang pariwisata. Bahwa calon tenaga pengajar/dosen harus memiliki gelar akademik yang sesuai dengan strata peserta didik serta keahlian pada bidang yang akan diajarkannya.

- 2. Koordinasi akademik. Dalam konteks koordinasi akademik, sivitas akademika pendidikan vokasi bidang kepariwisataan diharapkan mampu berkoordinasi secara internal dalam lembaga pendidikan sebagai upaya penyampaian materi ajar secara optimal kepada peserta didik.

Dalam hal ini seluruh sivitas akademika harus mampu bekerja secara terintegrasi dan terorganisir sesuai *standard operating procedure* (SOP) yang telah ditetapkan oleh lembaga pendidikan

- 3. Performa. Penilaian terhadap performasi/kinerja sivitas akademika perlu diterapkan secara konsisten. Penilaian performa ini harus diberikan secara objektif oleh mahasiswa, program studi, atasan, maupun lembaga. Secara umum, tugas penilaian ini dilakukan oleh unit penjaminan mutu dari lembaga pendidikan.
- 4. Peningkatan pengetahuan secara berkala. Pendidikan vokasi termasuk bidang pariwisata merupakan pendidikan yang

berorientasi kepada dunia kerja. Oleh karena itu seluruh sivitas akademika lembaga pendidikan vokasi harus memiliki program peningkatan pengetahuan yang dilakukan secara berkala kepada seluruh civitas akademika.

Kondisi ini diharapkan akan mampu meningkatkan kompetensi sivitas akademika secara *up to date* serta disampaikan kepada peserta didik.

5. Peningkatan jenjang pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata. Restrukturisasi kurikulum pendidikan tinggi vokasi termasuk bidang pariwisata yang memungkinkan lulusan program vokasi untuk melanjutkan pendidikan vokasi yang lebih tinggi (program magister terapan dan doktor terapan) ataupun yang berbasis akademik (master dan doktor) melalui suatu proses artikulasi yang mengakui dan menghargai kompetensi yang diperoleh dari pendidikan dan pengalaman kerja.

Dengan demikian sistem pendidikan bidang vokasi harus mampu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh seseorang di manapun dan dengan cara apapun. Hal ini akan memotivasi seseorang yang telah mempunyai kompetensi tertentu (dari pengalaman kerja) berusaha untuk mendapatkan pengakuan sebagai bekal untuk mengikuti pendidikan lanjutan.

Sistem ini menerapkan prinsip *multi exit multi entry* dimana prinsip ini memungkinkan lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang telah memiliki sejumlah kompetensi, mendapatkan kesempatan kerja di dunia kerja, maka siswa tersebut dimungkinkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Melihat berbagai pengetahuan yang menjadi hasil akhir dari suatu bentuk pendidikan termasuk pendidikan vokasi bidang pariwisata, dapat terlihat tingginya tanggung jawab pendidikan tinggi vokasi. Dengan kata lain, melalui pendidikan akan diperoleh

calon tenaga kerja yang berkualitas sehingga lebih produktif dan memiliki nilai daya saing.

Upaya Strategi-4: Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata dengan upaya-upaya sebagai berikut.

a. Program “*Sister Institution*”.

Dalam berbagai pembahasan sebelumnya, diindikasikan daya saing SDM Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara lain, baik pada skala regional maupun internasional yang diikuti oleh ekspor tenaga kerja Indonesia saat ini, di mana saat ini lebih banyak tenaga kerja non terampil pada sektor non formal.

Program *sister institution* merupakan kerjasama sama secara intensif antara institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata di Indonesia dengan institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata ternama dan tersertifikasi internasional di luar negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata nasional dalam meningkatkan tata kelola maupun kompetensi lulusannya agar dapat memenuhi kualifikasi internasional dengan tetap mempertahankan *local wisdom* yang akan menjadi ciri pembeda.

Program ini akan memberikan peluang kepada institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata nasional untuk bersaing secara global dan tidak hanya sebagai bentuk *intake* mahasiswa bagi institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata di luar negeri.

Penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada standar-standar internasional akan lebih memudahkan penyerapan tenaga kerja terampil pada sektor kepariwisataan di industri kepariwisataan internasional.

b. Distribusi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata.

Penyelenggaraan pendidikan yang mengacu kepada standar-standar internasional akan lebih memudahkan penyerapan tenaga kerja terampil pada sektor kepariwisataan di industri kepariwisataan internasional.

Hal ini akan dapat meningkatkan daya saing SDM nasional selain juga pada peningkatan devisa negara dari tenaga kerja. Dalam hal ini lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata harus *well recognize* baik secara informasi (e-commerce) maupun secara sertifikasi.

Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan penyusunan *data base* tenaga kerja vokasi bidang pariwisata yang kemudian diinformasikan secara global melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini akan meningkatkan distribusi lulusan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata secara nasional (sebagai aspek pemerataan) maupun global yang dapat meningkatkan daya saing SDM nasional selain juga pada peningkatan devisa negara dari tenaga kerja.

BAB VII

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal yang terkait dengan percepatan pendidikan vokasi bidang pariwisata berbasis *penta helix* guna peningkatan daya saing bangsa dalam rangka ketahanan nasional adalah sebagai berikut:

- a. Peranan dunia pendidikan dalam menyongsong era globalisasi, merupakan hal yang sangat penting. Baik berupa pendidikan secara formal, non formal, dan informal apalagi dalam lingkup pendidikan kejuruan. Karena bagaimanapun adanya berbagai persaingan global ini akan melahirkan dampak bagi manusia Indonesia untuk mengejar kompetensi yang di harapkan agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat negara-negara lain dalam menghadapi tingginya persaingan.

Dengan semakin meningkatnya kinerja kepariwisataan nasional, pendidikan tinggi vokasi bidang kepariwisataan akan memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan kepariwisataan nasional, yakni melalui kemampuan untuk menghasilkan SDM atau tenaga kerja yang terampil, produktif, dan professional sesuai tuntutan era globalisasi dan kebutuhan industri pariwisata.

- b. Perguruan tinggi vokasi bidang pariwisata membekali lulusannya dengan ilmu dan kompetensi yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja nasional dan internasional pada bidang pariwisata.

Selain menyiapkan tenaga didik menjadi tenaga kerja produktif, memenuhi keperluan tenaga kerja dunia usaha dan industri, menciptakan lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain, mengubah status peserta didik dan bangsa dari ketergantungan menjadi bangsa yang lebih produktif.

- c. Dalam meningkatkan peran pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata adalah dengan mengimplemtasikan strategi pengembangan pendidikan vokasi bidang pariwisata dengan diikuti “komitmen” yang kuat dari semua *stakeholders* pendidikan, baik internal maupun eksternal.
- d. Kebijakan sistem pendidikan nasional dan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata memerlukan penelahaan dan implemtasi secara mendalam dan intensif yang melibatkan para pengkaji kebijakan dan peneliti termasuk para praktisi pendidikan maupun industri pariwisata di Indonesia. Upaya ini perlu dilakukan dalam rangka mempercepat kemampuan daya saing bangsa dengan tetap berpegang pada kearifan budaya nasional.

2. Saran

Melalui Inpres No 6 tahun 2014, pemerintah terus meningkatkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi daya saing guna memacu produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam Inpres ini Presiden RI menginstruksikan kepada jajaran pemerintah di seluruh Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan daya saing nasional dan melakukan persiapan pelaksanaan MEA yang dimulai pada 2015.

Dalam menghadapi tantangan persaingan secara regional maupun global serta meningkatnya pasar bebas, pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata harus disiapkan dan diperbaiki secara intensif dan komprehensif.

Oleh karena itu, penulis memberikan saran dalam percepatan pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata yang dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pendidikan menjadi perhatian bagi pemerintahan di semua negara, dalam hal ini peran pemerintah menjadi sangat esensial sebagai lokomotif pembangunan pendidikan nasional termasuk pada pendidikan vokasi. Pemerintah diharapkan mampu.
- b. Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh rakyat di seluruh pelosok Indonesia yang sesuai dengan standar pendidikan yang ditetapkan termasuk kepada pemberian bantuan biaya pendidikan kepada masyarakat miskin untuk tetap melanjutkan pendidikan.
- c. Peningkatan kualitas tenaga pendidik serta kesejahteraannya, sehingga akan dapat meningkatkan kualifikasi lulusannya.
- d. Peningkatan infrastruktur, sarana, dan prasarana institusi pendidikan sehingga mampu menghasilkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan.
- e. Penyusunan dan penetapan kebijakan secara sinergi antar Kemenristek dengan K/L yang memiliki pendidikan tinggi vokasi agar dapat tercapainya SDM yang berkualifikasi sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional. Sinergitas dalam bentuk kebijakan berupa kemudahan dalam mengakses sivitas akademika pendidikan tinggi vokasi ternama di luar negeri.

Dalam mewujudkan saran tersebut diatas, maka peran *stakeholders* dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Bagi akademisi, selain fungsi pelaksanaan kajian yang dapat memberikan masukan kepada seluruh *stakeholders* dalam pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, akademisi memiliki fungsi utama dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Fungsi-fungsi dalam proses belajar mengajar ini adalah sebagai fungsi narasumber, pembimbing, penasehat, motivator, dan model. Keseluruhan fungsi ini harus dilaksanakan oleh akademisi secara konsisten guna menciptakan SDM nasional yang berkualifikasi dan berdaya saing.

- b. Harapannya terhadap dunia industri, bahwa dunia industri dapat menjadi partner bagi institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata dalam meningkatkan kualitas peserta didik. Dalam hal ini partisipasi aktif dari industri dalam peningkatan kualifikasi pendidikan vokasi maupun kualifikasi peserta didik serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.
- c. Masyarakat sebagai penerima manfaat terhadap keberadaan pendidikan vokasi diharapkan dapat memberikan suasana yang kondusif serta dukungannya kepada institusi pendidikan dalam mendidik peserta didik sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkannya.
- d. Peran media sebagai sarana informasi diharapkan mampu memberikan informasi yang baik secara nasional maupun global terhadap pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata, sehingga mampu meningkatkan keinginan masyarakat dalam menempuh pendidikan vokasi maupun kerjasama antarinstansi pendidikan tinggi vokasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Brad Davies, 2015 Vocational Training For Global Economic -A focus on major trends in vocational education and training in the Asian region, Dandolopartners, September 2015.
- Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Munib, A. 2009. Pengantar Ilmu Pendidikan. Semarang. UNNES PRESS
- Sabar Narimo, 2015 Membangun Daya Saing Lulusan Pendidikan (Akuntansi) Tinggi Bertumpu Pada Penguatan Kurikulum Berbasis KKN. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Akuntansi dan Keuangan.
- Soesilowati, Endang S dkk, 2008. Link and Match Dunia Pendidikan dan Industri Dalam Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Dan Industri, Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009
- Sunardi, R.M. (2004) Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: teori ketahanan nasional, geostrategi Indonesia, dan ketahanan regional. Kuarternita Adidarma.
- Suryadi, Ace, dan Budimansyah, Dasim, 2004, Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Indonesia Baru, Bandung: Genesindo.

JURNAL

Crouch, G.I. and Ritchie, J.R.B, 2003. The Competitive Destination a Sustainable Tourism Perspective, UK. Wallingford.

Halibas, Alrence Satiago; Sibayan, Rowena Ocier; Maata, Rolou Lyn, THE PENTA HELIX MODEL OF INNOVATION IN OMAN: AN HEI PERSPECTIVE Interdisciplinary Of Information, Knowledge, and Management Volume 12, 2017.

Herminarto, Sofyan dkk, 2012 Paradigma Baru Pendidikan Vokasi, Artikel diakses tanggal 21 September 2017.

Yulia, 2015 Membangun Daya Saing Bangsa Melalui Pendidikan: Refleksi Profesionalisme Guru Di Era Globalisasi, Jurnal Tarbiyah al-Awlad, Volume IV Edisi 2 hlm. 435-444.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional Undang-Undang no 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan

Tinggi Negeri

SUMBER LAIN DAN WEBSITE:

Rangkuman Hasil Pokja FRI 2006/2007. (2007) Tekad Memperbaiki Nasib Bangsa Pascaamandemen UUD: Optimisme Baru dalam Merealisasikan Visi Bangsa, Konvensi Kampus ke-4 dan Temu Tahunan FRI ke-10, Bandung, 16-17 Juli 2007.

Sukanto, 1998. Orientasi dunia kerja dalam proses dan status akreditasi SMK. Jurnal Kependidikan Edisi Khusus Dies Tahun XXXVIII. Hal. 109 – 126.

Suradinata, Ermaya, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis, Suara Bebas, Jakarta; 2006.

UNDP (2015). *Human Development Report*.
hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf.

Analisis Daya Saing Indonesia Tahun 2016-2017: Sebuah Analisis Kebijakan Manajemen Keuangan Internasional (PDF Download Available). Available from:
https://www.researchgate.net/publication/311594011_Analisis_Daya_Saing_Indonesia_Tahun_20162017_Sebuah_Analisis_Kebijakan_Manajemen_Keuangan_Internasional.

www.goodnewsfromindonesia.id/2017/09/14/world-economic-forum-lansir-peringkat-kualitas-sdm-dunia-ini-peringkat-indonesia.

<http://www.jpnn.com,2017>

<http://www.kemenperin.go.id,2016>

CATATAN:

¹Laporan BPS, 2016

²Yulia “MembangundayaSaingBangsaMelaluiPendidikan”,2015;438

³Narimo “Membangun daya Saing Lulusan Pendidikan (Akuntansi) Tinggi Bertumpu Pada Penguatan Kurikulum Berbasis KKN” ,2015;433

⁴Soesilowati Dkk Link And Match Dunia Pendidikan dan Industri dalam Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja dan Industri

⁵Suradinata, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis, 2005: 47 atau Soemarsono, dkk, 2001: 106.

⁶Narimo “Membangun daya Saing Lulusan Pendidikan (Akuntansi) Tinggi Bertumpu Pada Penguatan Kurikulum Berbasis KKN” ,2015;433

¹⁴Arief Yahya, 2017.

LAMPIRAN

LAMPIRAN
GRAND DESIGN PERCEPATAN PENDIDIKAN TINGGI VOKASI BIDANG PARIWISATA

Tantangan Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata	Orientasi Strategis	Strategi	PENTA-HELIX			Upaya/Langkah
				Utama	Pendukung	
<p>1. Peningkatan Persaingan Regional dan Global</p> <p>2. Masih Rendahnya Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata</p> <p>3. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Antar Stakeholders</p>	<p>Visi : Terselenggaranya Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata Berdaya Saing</p> <p>Misi :</p> <p>1. Terlaksananya Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Berorientasi Kepada Kebutuhan Industri Pariwisata</p> <p>2. Terlaksananya Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata Yang Berorientasi Kepada Standar Internasional</p> <p>3. Terciptanya Sumber Daya Manusia Bidang</p>	<p>1. Transformasi Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata</p>	<p>Pemerintah</p> <p>Akademisi</p> <p>Industri</p> <p>Masyarakat</p> <p>Media</p>	<p>√</p> <p>√</p> <p>√</p>	<p></p> <p>√</p> <p>√</p>	<p>1. Modernisasi Sistem Manajemen Dan Sistem Pengajaran yang berbasis Teknologi Informasi</p> <p>2. Implementasi <i>Tracer Study</i></p> <p>3. Penguatan Tata Kelola Institusi Pendidikan Vokasi Bidang Pariwisata</p> <p>4. Penggunaan Teknologi Informasi (<i>e-commerce</i>) dalam meningkatkan eksistensi Institusi pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata.</p> <p>5. Penguatan Anggaran Pendidikan Tinggi</p>

4. Peningkatan Aktivitas Dan Kinerja Kepariwisata Nasional	Pariwisata Yang Kompeten Dan Berkepribadian Nasional					Vokasi Bidang Pariwisata
5. Tingginya keinginan pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa dan ketahanan nasional	Tujuan: 1. Terciptanya sumber daya manusia bidang kepariwisataan yang kompeten dan berdaya saing 2. Terintegrasinya pendidikan tinggi bidang vokasi dengan kebutuhan industri pariwisata 3. Terwujudnya lembaga pendidikan tinggi vokasi bidang pariwisata berstandar global	2. Sinergitas Dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata	Pemerintah Akademisi Industri Masyarakat Media	√ √ √	√ √	1. Pemetaan <i>Stakeholders</i> Dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata 2. Institusionalisasi <i>Stakeholders</i> Terkait Dengan Dukungan Terhadap Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata 3. Revitalisasi Peran Industri Pariwisata Dalam Peningkatan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata
		3. Restrukturisasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata	Pemerintah Akademisi Industri Masyarakat Media	√ √	√ √	1. Evaluasi Kurikulum 2. Reorientasi Kurikulum 3. Reorientasi Tata Kelola Civitas Akademika Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata

					√	4. Peningkatan Jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata
		4. Internasionalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata	Pemerintah Akademisi Industri Masyarakat Media	√ √ √	√ √	1. Program “Sister Institution” 2. Distribusi Lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata

